

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Kabupaten Dompu, pergeseran pola ekonomi dari pertanian subsisten menjadi pertanian komersial yang didominasi oleh komoditas jagung telah menjadi katalisator bagi transformasi besar dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Perubahan orientasi ini, yang didorong oleh kebutuhan moneter, secara langsung menciptakan tekanan baru terhadap lanskap hutan tropis kering yang secara historis rapuh dan pada akhirnya mendefinisikan ulang batas-batas ekologis yang dapat diterima. Kelangsungan Hidup masyarakat Dompu pada akhirnya tergantung pada ketersediaan lahan, intensifikasi lahan yang telah terjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan orientasi ekonomi masyarakat sehingga membuat terjadinya ekstensifikasi lahan dalam skala besar serta luas yang dimana sulit untuk dikendalikan. Ekstensifikasi lahan terlibat dalam pembukaan kawasan hutan, ditambah lagi dengan kepentingan bisnis industri terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis telah menimbulkan eksploitasi tidak terbatas, baik secara legal dan ilegal sehingga menyebabkan deforestasi.

Secara ekologis, Kabupaten Dompu diklasifikasikan sebagai wilayah "Indonesia Luar" dengan lanskap dominan perbukitan berbatu dan hutan tropis kering. Data lama (Napiri, 2005) menunjukkan bahwa mayoritas lahan (64%) adalah kawasan hutan. Namun, seiring diimplementasikannya Program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut), data terbaru memperlihatkan akselerasi alih fungsi lahan yang drastis, terutama di kawasan hutan lindung, untuk mengakomodasi penanaman jagung (Primadi, Susanti & Ridha, 2017). Alih fungsi lahan menjadi pertanian di kawasan hutan lindung mengalami kenaikan drastis. Luas lahan yang digunakan sebagai kawasan pertanian mencapai 43,6 ribu hektar, yang menunjukkan peningkatan hingga lebih dari empat kali lipat (420,3%) dibandingkan dengan total alih fungsi lahan pada tahun 2012 (Primadi, Susanti & Ridha, 2017). Berdasarkan data wawancara awal dengan *stackholder* Kecamatan Hu'u pada 16 Oktober 2023, efektivitas implementasi Program PIJAR, khususnya pada sektor jagung terkonfirmasi melalui peningkatan dramatis pada indikator kunci ekonomi daerah, yaitu Gross Domestic Product (GDP) Kabupaten Dompu.

Antusias masyarakat begitu kuat untuk mengembangkan komoditas jagung menjadi lebih pesat. Semangat ini yang mengakibatkan masifnya pembukaan lahan pada rangkaian perbukitan hutan tropis kering menjadi lahan pertanian jagung. Tak ayal, masifnya pembukaan lahan hutan mempercepat terjadinya deforestasi di kawasan perbukitan Kabupaten Dompu. Terdapat kontradiksi mendasar dalam strategi pembangunan, dimana dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru menjadi faktor dominan yang mengakselerasi degradasi lingkungan.

Insentif ekonomi yang mendorong masifnya ekstensifikasi lahan ini terbukti secara empiris melalui analisis pendapatan petani jagung. Data dari Mernawati, Hayati, dan Muktasam (2023) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu tergolong tinggi, bahkan hampir tidak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan status penguasaan lahan. Rata-rata pendapatan dari penanaman di lahan sendiri mencapai Rp24.595.444, di lahan sendiri dan Negara sebesar Rp23.291.240, dan di lahan Negara sebesar Rp23.523.800 (hanya lahan Negara yang disewa yang sedikit lebih rendah, yaitu Rp20.885.740). Keberhasilan ekonomi jangka pendek ini membuktikan efektivitas orientasi pasar. Namun, sebuah kontradiksi kritis muncul, para peneliti yang sama memperingatkan bahwa meskipun pendapatan saat ini tinggi, kelanjutan aktivitas pembebasan lahan akan membawa kerugian besar di masa depan. Oleh karena itu, mereka secara eksplisit menyarankan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian demi menjamin keberlanjutan usahatani dan ekosistem.

Alih fungsi kawasan hutan tropis kering Dompu menjadi ladang jagung melanggar prinsip kemampuan lahan, sebab tanah di kawasan perbukitan tersebut secara fundamental tidak dirancang untuk praktik budidaya intensif. Maga (2011) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kesesuaian fungsi lahan inilah yang menjadi pemicu utama degradasi tanah di wilayah tersebut. Ini

secara perlahan turut menyebabkan beberapa mata air hilang, debit air menurun, potensi longsor dan banjir. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 Kabupaten Dompu mengalami bencana banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya, banjir ini juga terjadi pada wilayah pusat kota Kabupaten Dompu hingga ke daerah pedesaan yang notabene menjadi sentral atau pusat lahan pertanian jagung (Primadi, Susanti & Ridha, 2017). Lebih lanjut, menurut pernyataan beberapa masyarakat pada tahun 2021 silam salah satu desa yakni Desa Daha yang ada di Kecamatan Hu'u mengalami banjir, bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya (Informan JHN, 18 Oktober 2023).

Di rangkaian perbukitan Dompu, transformasi penggunaan lahan dari ekosistem hutan yang stabil menjadi ladang jagung memperlihatkan dampak destruktif. Proses ini secara langsung menginduksi erosi tanah secara masif, yang pada gilirannya memperluas daerah yang tergolong lahan kritis dan mempercepat kerentanan ekologis Dompu. Secara struktural, laju deforestasi ini diperparah oleh kebijakan pembangunan daerah. Di satu sisi, pemerintah tidak secara terang-terangan mengungkapkan lahan hutan mana yang boleh dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Namun di sisi lain, program PIJAR yang diusung oleh pemerintah daerah ditafsirkan oleh masyarakat sebagai izin atau dorongan kuat untuk membuka lahan seluas-luasnya, bahkan jika harus merambah kawasan hutan, demi kepentingan orientasi ekonomi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan dan salah tafsir di tingkat implementasi yang secara langsung mendorong pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk komoditas jagung, sebagaimana juga terjadi di wilayah lain di NTB seperti Bima (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2023). Situasi ini menggarisbawahi bagaimana insentif ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dapat secara ironis bertindak sebagai kekuatan pendorong utama degradasi lingkungan.

Fenomena komersialisasi pertanian di Dompu menuntut suatu tinjauan yang komprehensif, bukan hanya pada dimensi material ekonomi, melainkan juga pada dimensi moralitas dan nilai sosial. Mengacu pada kerangka pemikiran Hefner (2000), penetrasi pasar selalu melibatkan negosiasi nilai-nilai lama dan kebutuhan modern misalnya, biaya pendidikan. Tekanan ini secara spesifik mewujudkan dalam dilema moral di Dompu, masyarakat terpaksa memilih antara menghasilkan pendapatan cepat melalui eksploitasi lahan hutan untuk jagung atau berpegang pada prinsip-prinsip konservasi ekologis. Hasil dari pilihan-pilihan tersebut merupakan redefinisi fundamental terhadap identitas, aspirasi, dan hierarki sosial dalam masyarakat yang semakin terintegrasi dengan mekanisme pasar. Transisi masyarakat dari struktur kebutuhan yang mapan menuju keterlibatan dalam ekonomi pasar global menciptakan medan negosiasi baru. Dalam medan ini, identitas dan selera dikonstruksi ulang agar selaras dengan kepentingan produksi dan pencapaian status. Perubahan ini tidak bersifat parsial, melainkan holistik, melibatkan redefinisi, reorganisasi, dan renegosiasi pada praktik produksi, pola konsumsi, serta sistem nilai budaya. Kecenderungan terhadap rasionalitas instrumental ini, disadari atau tidak, bertindak sebagai kekuatan rekonstruktif yang membentuk dasar dan corak kehidupan sosial.

Di tengah ketegangan berkelanjutan antara tuntutan lingkungan dan pembangunan ekonomi, persepsi masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh keberhasilan Program PIJAR dan orientasi pasar mereka, menjadi fundamental dalam membentuk pandangan ekologis. Penelitian ini menjadi krusial karena berupaya memetakan berbagai relasi yang memengaruhi pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong eksploitasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalian nilai-nilai, pengetahuan, dan cara pandang masyarakat secara emik, agar dapat dipahami secara komprehensif bagaimana deforestasi di Dompu terjadi.

Jika fenomena pemanfaatan lahan hutan untuk pertanian jagung di Dompu dianalisis secara empiris dalam konteks yang lebih luas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi beberapa gejala yang signifikan yang berakar pada konflik antara agenda pembangunan dan perlindungan lingkungan. Kontradiksi mendasar terletak pada strategi pembangunan itu sendiri, di mana dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru menjadi faktor dominan yang mempercepat degradasi lingkungan (Rajagukguk, 2015). Secara spesifik, hal ini bermanifestasi sebagai penurunan kapasitas sumber daya alam yang disebabkan oleh praktik pembukaan lahan berlebih, yang mengindikasikan ketidakseimbangan antara kondisi sumber daya

alam yang terus berkurang dengan jumlah populasi manusia yang bergantung pada sumber daya tersebut (Commoner, 1971)

Lebih lanjut, kerusakan ekosistem di wilayah Dompu mencakup perubahan signifikan pada vegetasi, tanah, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Aliih fungsi lahan hutan menjadi lahan monokultur jagung telah memperburuk sifat fisik dan kimia tanah—terutama melalui penurunan bahan organik dan peningkatan erosi—sehingga mempercepat ketidakproduktifan lahan (Barchia, 2009). Daerah-daerah tempat berlangsungnya eksploitasi sumber daya ini bukanlah ekosistem yang tertutup, melainkan merupakan lingkungan terbuka yang melibatkan berbagai pihak dari latar belakang etnis, tempat asal, dan kategori sosial yang berbeda-beda. Akibatnya, tekanan terhadap sumber daya alam semakin besar, di mana akses dan kontrol terhadap lahan dan komoditas diatur oleh dinamika ekonomi-politik yang kompleks (Ribot & Peluso, 2003).

Pada akhirnya fenomena ini menciptakan ketimpangan sosial ekonomi di antara individu dan kelompok-kelompok dalam komunitas lokal, terutama di antara para pelaku yang memiliki akses lebih terhadap sumber daya dan mereka yang lebih rentan. Disfungsi dalam mekanisme regulasi yang seharusnya mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan adil, baik pada tingkat mikro sosial kelompok kerja, komunitas, atau desa maupun pada tingkat makro sosial formal (kebijakan pemerintah daerah dan nasional, tampaknya tidak efektif. Hal ini menyebabkan hilangnya nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik pemanfaatan sumber daya alam.

Di sisi lain, Sifat hubungan timbal balik antara manusia dan alam memiliki riwayat panjang, dan pemaknaannya berbeda-beda di setiap wilayah. Dalam pandangan Afiff (2022), terdapat perbedaan mencolok antara konstruksi ilmiah, seperti kategori “hutan” dan non-hutan dengan konstruksi lokal, yang mungkin mendefinisikan bentang alam yang sama sebagai “kebun” atau “hutan.” Oleh karena itu, alam harus dipahami sebagai entitas yang tidak hanya memiliki kekuatan otonom dari manusia, tetapi juga merupakan hasil dari proses kultural yang membentuk konsep keberadaannya.

Kognisi atau pemahaman yang dimiliki seseorang tentang suatu hal adalah penentu utama yang membentuk perilakunya. Oleh karena itu, Crespo (2012) berargumen bahwa keputusan yang diambil oleh individu merupakan hasil langsung dari pandangan internal mereka. Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah yang secara geografis tergolong daerah hamparan kering memilih berfokus pada pertanian jagung yang mengharuskan melakukan penggundulan hutan untuk areal terbuka sangat menarik untuk dipelajari. Namun yang menjadi sorotan bagaimana masyarakat dalam memandang lingkungan, apakah alam dapat dieksploitasi demi peningkatan ekonomi atau sebaliknya, secara implisit masyarakat telah berdampingan dengan keberlangsungan lingkungan dan melegitimasi bahwa kerusakan lingkungan demi kebutuhan orientasi ekonomi bukan hal yang asing.

Sedangkan fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis di Dompu tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kegagalan kesadaran lingkungan atau runtuhnya nilai-nilai moral masyarakat lokal. Meskipun banyak petani memiliki pengetahuan empiris mengenai dampak deforestasi, keputusan untuk terus membuka lahan tetap diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang bersifat mendesak. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan ekonomi moral James C. Scott (1976) yang menekankan etika subsistensi dan rasionalitas *safety-first*, karena dalam konteks Dompu, petani justru bersedia mengambil risiko ekologis yang besar demi peluang ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menjelaskan petani sebagai aktor rasional yang melakukan kalkulasi untung–rugi dalam situasi ketidakpastian struktural, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel L. Popkin dalam konsep *rational peasant* (Popkin, 1979).

Kajian mendalam dibutuhkan untuk menguraikan pandangan, faktor-faktor yang melatarbelakangi kerusakan lingkungan di Kabupaten Dompu. Peneliti tertarik untuk menganalisis secara komprehensif, tidak hanya mengenai keterkaitan antara pandangan masyarakat dengan kasus pembukaan lahan, tetapi juga menyelidiki pengaruh variabel-variabel lain seperti pola hidup,

kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, dan persepsi lokal terhadap alam. Berdasarkan kompleksitas masalah ini, studi ini berjudul “Antara Krisis Ekologi dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Antropologi Tentang Persepsi Terhadap Deforestasi Akibat Jagung di Kabupaten Dompu”.

Pada hakikatnya penelitian yang mempunyai topik tentang pandangan masyarakat terhadap kerusakan ekologis sudah mempunyai banyak variasi dan pernah menjadi topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Terdapat banyak pembahasan yang di kumukann baik para ahli, peneliti dan akademisi tentang Topik Ini. Seperti, Pertama Salah satu penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap lingkungan adalah penelitian yang dilakukan oleh Edo Firnanda dengan judul penelitian Edo Firnanda (2020) melalui penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Daerah Penyangga Terhadap Fungsi Ekologi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan” menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antara persepsi, pengetahuan, dan karakteristik sosial masyarakat TNBBS. Studi tersebut mengasumsikan bahwa persepsi yang akurat tentang fungsi lingkungan akan mendorong perilaku pelestarian yang positif. Hasil temuan memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi ekologi hutan umumnya tinggi. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa faktor individual seperti usia dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan persepsi masyarakat mengenai fungsi ekologis hutan TNBBS.

Kedua, Penelitian lain tentang pandangan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan adalah Agung Ferianda dengan judul Studi tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah mengkaji “Persepsi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Timah”, sebuah isu krusial mengingat Bangka merupakan sentra pertambangan timah nasional. Penelitian ini dirancang dengan teknik analisis gabungan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuan mengukur sejauh mana masyarakat memahami kerusakan yang diakibatkan aktivitas penambangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat didominasi oleh kategori sedang, dengan proporsi persepsi tinggi yang minimal. Pengetahuan masyarakat diidentifikasi sebagai variabel yang paling kuat dalam memengaruhi tingkat persepsi tersebut.

Ketiga, adapun dari Beby Banteng dkk pada tahun 2015 dengan judul Penelitian “Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Kerusakan Ekologis Danau Limboto Provinsi Gorontalo” dilatarbelakangi oleh kondisi danau yang kian kritis dan mengancam keberlangsungan hidup komunitas yang bergantung secara sosial-ekonomi padanya. Kerusakan ekosistem Danau Limboto dipicu oleh praktik perikanan lokal yang tidak ramah lingkungan, bahkan memicu intervensi penegakan hukum. Studi ini menemukan bahwa tingkat persepsi masyarakat yang rendah merupakan faktor penentu yang mengakibatkan partisipasi lemah, ketidakpedulian, dan sikap apatis dalam upaya mengurangi maupun memulihkan kerusakan lingkungan.

Keempat, selain itu Si Luh Ayu Pawitri pada 2022, berupaya melacak dan menguraikan masuknya ekspansi sawit di Papua yang menyebabkan konflik tenurial berkelanjutan. Dengan menggunakan perspektif Ekologi Politik, studi ini menganalisis adanya perbedaan pandangan dan nilai terhadap alam antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Intinya, ekspansi sawit yang menganut sistem monokultur dianggap merugikan ekosistem dan masyarakat karena memproduksi masalah deforestasi, konflik lahan, dan perampasan hak ulayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi alam dilakukan karena alam dianggap sebagai objek tak berdaya, mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang timpang. Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama menggunakan kerangka Ekologi Politik untuk mengkaji masalah monokultur yang berujung deforestasi. Namun, terdapat perbedaan krusial Penelitian terdahulu berfokus pada Kelapa Sawit komoditas industri jangka Panjang, dan konflik utama terjadi antara perusahaan besar melawan masyarakat adat yang merupakan konflik top-down. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Jagung yang merupakan komoditas tahunan dan deforestasi dilakukan oleh Masyarakat Lokal itu sendiri sebagai respons terhadap Program Pemerintah (PIJAR) dan tekanan pasar. Analisis Anda lebih dalam pada tingkat rumah tangga dan dilema moral.

Kelima, berbeda dengan Penelitian sebelumnya Artikel yang sangat diperdebatkan oleh Lynn White, Jr. pada tahun 1960-an, *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, mengusulkan tesis bahwa krisis lingkungan berakar pada etika. Ia berpendapat bahwa antroposentrisme yang

bersumber dari tradisi Yudeo-Kristiani menciptakan dikotomi antara manusia dan alam, di mana manusia berposisi sebagai penguasa yang sah atas alam. White lebih lanjut menguatkan bahwa eskalasi kerusakan lingkungan menjadi dramatis dan sistemik karena didukung oleh aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pandangan antroposentris tersebut diterjemahkan menjadi eksploitasi berskala besar.

Keenam, studi oleh Austin 2019 yang berjudul *Drivers of Deforestation in Indonesia: A Comparison of Industrial and Smallholder Oil Palm, and Other Commodities*, meskipun fokus utamanya adalah kelapa sawit, studi ini sering memuat perbandingan dengan komoditas lain termasuk *annual crops* seperti jagung) dan menunjukkan bahwa petani kecil juga menjadi aktor utama deforestasi, yang relevan dengan kasus Dompu. Analisis ini memberikan landasan empiris bahwa deforestasi tidak hanya didorong oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh dinamika tingkat petani.

Ketujuh, tinjauan literatur fundamental oleh Angelsen, A. 1999, *Agricultural Expansion and Tropical Deforestation: Where Is the Link?*, merupakan kajian penting untuk memahami hubungan antara ekspansi pertanian dan deforestasi. Penelitian ini secara spesifik membahas peran intensifikasi vs. ekstensifikasi lahan oleh petani, yang sangat relevan dengan komoditas jagung. Angelsen membantu menganalisis mengapa petani Dompu memilih jalur ekstensifikasi lahan (pembukaan hutan) daripada intensifikasi penggunaan lahan yang ada, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan tekanan pasar dan kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan (Firnanda, 2020; Ferianda, 2020; Banteng dkk., 2015) umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat persepsi (tinggi, sedang, rendah) dan mencari korelasi dengan faktor-faktor individual (usia, pendidikan, pengetahuan). Celahnya adalah, studi-studi tersebut belum mampu menjelaskan secara mendalam mengapa persepsi yang tinggi terhadap fungsi lingkungan seperti temuan Firnanda, 2020, dan mungkin juga terjadi di Dompu justru tidak sejalan dengan perilaku konservasi di lapangan yaitu, mengapa masyarakat tetap membuka hutan.

Studi Ekologi Politik seperti milik Pawitri (2022) dan tinjauan literatur Austin et al. (2019) sudah memfokuskan pada deforestasi akibat komoditas. Namun, terdapat tiga celah krusial yang ditinggalkan oleh literatur tersebut, yang dijawab oleh studi ini. Penelitian Ekologi Politik deforestasi (Pawitri, 2022) didominasi oleh komoditas industri jangka panjang (Sawit), di mana konflik terjadi antara perusahaan besar vs. masyarakat adat (konflik Top-Down). Sedangkan, studi ini berfokus pada komoditas pangan tahunan (Jagung) di lahan kering, di mana aktor deforestasi utamanya adalah petani kecil lokal sebagai respons terhadap insentif pasar dan kebijakan (Program PIJAR). Penelitian ini mengkaji deforestasi oleh masyarakat sendiri, bukan oleh korporasi.

Analisis persepsi cenderung dangkal (mengukur tingkat) atau fokus pada relasi kekuasaan makro Ekologi Politik atau etika abstrak White, 1960-an. Dalam studi saya menggunakan analisis Antropologi mendalam untuk mengungkap mengapa petani Dompu, meskipun *sadar* bahwa tindakannya merusak, *terpaksa* memilih eksploitasi?. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji fenomena inkonsistensi kebijakan lokal seperti Program PIJAR di mana pemerintah mendorong pertumbuhan jagung namun gagal menyediakan kapasitas struktural alternatif, sehingga secara tidak langsung melegitimasi pembukaan hutan di kawasan rentan Dompu sesuai temuan Purniawati dkk., 2023. Studi ini menyimpulkan bahwa krisis ekologis Dompu adalah manifestasi dari perangkap struktural, di mana petani menjadi korban sistem ekonomi-politik yang menutup akses terhadap pilihan ekologis yang adil, bukan sekadar pelaku kerusakan.

1.2. Masalah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Kabupaten Dompu yang berlandaskan konsep dasar antropologi, yaitu sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, dan organisasi sosial. Ketiga elemen ini berperan penting dalam mempengaruhi kerusakan lingkungan di tengah pengembangan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dan lingkungannya, khususnya terkait dengan sistem pengetahuan yang mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menilai lingkungan serta keputusan yang diambil

untuk orientasi ekonomi. Studi ini diperluas untuk menganalisis bagaimana struktur organisasi sosial yang ada di Kabupaten Dompu secara langsung memfasilitasi atau bahkan mempercepat proses deforestasi dalam skala masif.

Dinamika yang terjadi pada kelompok masyarakat Kabupaten Dompu, khususnya pada sistem pengetahuan telah mengalami pergeseran dalam memahami, memaknai dan menerapkan nilai-nilai pengelolaan, tanggung jawab kepada lingkungan hutan dan alam serta orientasi terhadap ekonomi. Ada tiga pertanyaan besar yang akan dijawab melalui penelitian ini:

1. Bagaimana Masyarakat Dompu memandang kerusakan lingkungan akibat jagung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kerusakan lingkungan?
3. Apa dampak yang dialami masyarakat terhadap kerusakan lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Dompu mengenai deforestasi yang diakibatkan oleh tanaman jagung. Maka dari itu, tujuan penelitian ini dijabarkan pada tiga tujuan, antara lain:

1. Menganalisis pandangan masyarakat Dompu mengenai deforestasi yang diakibatkan oleh jagung.
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya deforestasi yang diakibatkan oleh jagung.
3. Menguraikan bagaimana dampak yang dialami masyarakat terhadap deforestasi yang diakibatkan oleh jagung

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan yang terbagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu Menyajikan informasi ilmiah mendalam, khususnya dari perspektif Antropologi Ekologi, mengenai pandangan dan pemaknaan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Dompu. Selanjutnya, memberikan penjelasan komprehensif terkait faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya degradasi lingkungan di Dompu. Kemudian, mengungkap secara rinci dampak yang dirasakan dan dialami oleh komunitas lokal sebagai konsekuensi langsung dari maraknya kasus kerusakan lingkungan.

Secara khusus, temuan-temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya khazanah keilmuan Antropologi, terutama pada sub-disiplin Antropologi Ekologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan sebuah wacana mengenai perspektif baru dalam melihat fenomena kerusakan lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian membantu memberikan pemahaman tentang pandangan masyarakat di Kabupaten Dompu dengan menghimpun suara dari masyarakat lokal atau berbasis pada kemampuan komunitas lokal (*grassroot community*). Pendekatan ini lebih mampu mengakomodir nilai lokal (Kashikar, 2011). Individu yang berpengaruh dalam suatu kelompok masyarakat pun perlu dilibatkan (Wagner-Pacifi & Hall, 2012) dalam upaya ini sebelum sampai pada ranah institusi (Kashikar, 2011; Hegre & Nygård, 2015). Sebab, individu-individu tersebutlah yang paling dihormati dan disegani sekaligus memiliki kuasa untuk pengembangan ekonomi dan lingkungan.

Kontribusi metodologis dari penelitian ini terletak pada penyediaan data dan kerangka analisis yang dapat dikomparasikan dengan studi-studi ilmiah lain terkait degradasi lingkungan. Implikasi praktisnya sangat krusial, karena hasil ini diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan penting dalam merumuskan strategi penanggulangan masalah lingkungan di tingkat nasional. Lebih jauh, studi ini bertujuan mendorong sikap inklusif dalam diskursus ekologis, yaitu dengan mempromosikan penerimaan terhadap pandangan-pandangan alternatif yang tidak selalu sejalan dengan narasi tunggal krisis lingkungan.

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang pemahaman budaya, pemahaman lingkungan, serta teori antropologi ekologi. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi sumbangsih dan kontribusi wacana, terkhusus bagi para stakeholder bidang lingkungan, yakni penggiat studi lingkungan atau ekologi, LSM dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Dompu. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan

dalam perumusan kebijakan pembangunan kehidupan lingkungan dalam rangka penanggulangan masalah kerusakan lingkungan yang mulai semakin menggejala di tengah masyarakat kita. Selain itu, juga dapat bermanfaat dalam membangun narasi krisis ekologis di dalam masyarakat dan bernegara.

1.5. Studi Kasus

Studi kasus deforestasi jagung di Kabupaten Dompu menawarkan keunikan substansial dibandingkan dengan penelitian deforestasi atau persepsi lingkungan lainnya karena menyajikan konflik triadik yang kompleks melibatkan tekanan struktural, dilema moral, dan konteks ekologis yang rapuh. Keunikan ini berpusat pada tiga dimensi utama: Sebagian besar literatur *Political Ecology* terkemuka berfokus pada konflik deforestasi *top-down*, di mana perusahaan besar misalnya Kelapa Sawit adalah pelaku kerusakan, dan masyarakat lokal adalah korban yang mempertahankan hak ulayatnya (misalnya Pawitri, 2022). Pelaku utama pembukaan hutan adalah petani lokal Dompu itu sendiri. Petani menjadi aktor sekaligus korban dari sistem insentif yang ada.

Konflik di Dompu bukan sekadar konflik lahan, melainkan konflik internal di tingkat rumah tangga (ekonomi). Petani, yang secara sadar menyaksikan krisis ekologis erosi, hilangnya mata air, banjir dan memiliki persepsi tinggi terhadap fungsi hutan, tetap memilih untuk merusak lahan dengan menanam jagung. Penelitian ini menggali rasionalitas tersembunyi di balik perilaku destruktif tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan petani Dompu didorong oleh rasa ingin bertahan hidup, di mana kebutuhan moneter mendesak misalnya biaya pendidikan, kebutuhan komersial yang difasilitasi oleh jagung komoditas *cash-in-hand* yang cepat mengalahkan prinsip-prinsip konservasi.

Dompu berfokus pada jagung komoditas pangan tahunan bukan industri jangka panjang. Jagung, yang membutuhkan pembukaan lahan bersih dan cepat, memicu deforestasi berulang (*recurrent deforestation*) setiap musim tanam, berbeda dengan deforestasi permanen yang diakibatkan oleh Sawit. Kasus Dompu secara unik menunjukkan adanya kontradiksi mendasar dalam strategi pembangunan daerah. Program andalan pemerintah daerah (PIJAR) berhasil secara ekonomi, dibuktikan dengan peningkatan drastis GDP Kabupaten Dompu. Namun, keberhasilan ekonomi ini berbanding lurus dengan peningkatan kerusakan ekologis yang dilihat dari banjir, dan lahan kritis.

Studi ini menjadi analisis kasus yang kuat mengenai paradoks pembangunan di Indonesia, di mana indikator pertumbuhan ekonomi yang dianggap sukses justru merupakan indikator kegagalan ekologis yang memicu krisis, diperparah oleh inkonsistensi kebijakan yang ditafsirkan masyarakat sebagai lampu hijau untuk merambah hutan. Studi kasus berlokasi di wilayah hutan tropis kering sering disebut “Indonesia Luar” dengan dominasi perbukitan berbatu. Ekosistem ini jauh lebih rapuh dan kurang resilien terhadap budidaya monokultur intensif dibandingkan ekosistem hutan hujan tropis.

Alih fungsi lahan hutan kering menjadi ladang jagung monokultur secara drastis melanggar prinsip kemampuan lahan. Dampaknya sangat cepat dan parah: erosi masif, kehilangan bahan organik, penurunan debit mata air, dan bencana banjir bandang yang tidak pernah terjadi sebelumnya di pusat kota Dompu. Kasus Dompu menekankan bahwa deforestasi oleh komoditas yang tidak sesuai dengan ekologi lokal seperti jagung di lahan kering curam dapat memicu krisis yang lebih mendalam dan cepat dibandingkan di ekosistem yang lebih subur, memperkuat perlunya analisis berbasis Antropologi Ekologi terhadap kesesuaian kultural dan fisik.

Tesis ini menggali bagaimana masyarakat Dompu, melalui memori ekologis mereka, secara sadar mengakui adanya kerusakan lingkungan. Namun, kesadaran ekologis ini tidak diikuti oleh kemampuan struktural untuk mengubah praktik produksi. Bahasa daerah dan pengetahuan lokal dalam kasus ini berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai dan tradisi yang tertanam dalam identitas Dompu.

Sebagai bagian dari analisis sejarah lokal, studi ini menyoroti bagaimana peristiwa sejarah dan kebijakan pembangunan telah membentuk identitas dan cara hidup masyarakat lokal, yang kini rentan terhadap eksploitasi. Dalam konteks ini, analisis bertujuan untuk menunjukkan bagaimana

kedaulatan pangan dan pengetahuan lokal tererosi, dan bagaimana masyarakat menuntut reformasi kelembagaan dan kebijakan yang berkeadilan ekologis.

Pendekatan perilaku holistik dalam memahami krisis Dompu ini melibatkan dimensi emosional, fisik dalam hal ini degradasi lahan, dan kognitif yang dimana meliputi pengetahuan ekologis yang terpinggirkan, memungkinkan peneliti merasakan hubungan yang lebih dalam dengan konteks yang dipelajari. Kasus Dompu, dengan konflik berlapis antara tuntutan pasar, kerentanan lahan, dan dilema masyarakat, adalah contoh yang sangat relevan dengan penelitian ini, yang bertujuan membongkar krisis ekologis sebagai krisis moral dan politik dalam hubungan manusia dengan alam.

1.5.1. Kontras Fenomenologis

Sebagian besar studi Antropologi Ekologi di Indonesia menekankan bagaimana kearifan lokal berfungsi secara efektif menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian Nurfani Indah Putri (2021), misalnya, menunjukkan bahwa sistem *sasi* di Maluku berperan penting sebagai mekanisme sosial-ekologis yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut melalui norma adat dan sanksi moral. Sementara Ni Luh Chandrika (2020) dan Gia Laras Pangestu (2022) menegaskan bahwa praktik *sasi* bukan hanya ritual keagamaan, melainkan juga bentuk ekologi yang mentransmisikan nilai interdependensi antara manusia dan alam. Demikian pula, riset Ade Suryanda (2019) tentang Hutan Larangan Adat di Sumatera Barat memperlihatkan bagaimana otoritas adat menjadi penjaga utama keseimbangan ekologis, di mana pelanggaran terhadap larangan menebang atau berburu dianggap bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran moral terhadap komunitas dan leluhur.

Berbeda dari itu semua, kasus Dompu memperlihatkan arah yang kontras, dari konservasi menuju kegagalan adaptasi struktural. Kearifan lokal di sini bukan lenyap tanpa jejak, tetapi perlahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan politik yang bekerja secara sistemik. Pengetahuan tradisional tentang budidaya kelor, kopi, pengelolaan air, tumbuhan obat-obatan dan rotasi lahan yang dulu diwariskan antargenerasi kini mengalami pelemahan epistemik. Ia tidak hilang karena dilupakan, melainkan karena tak lagi punya nilai tukar dalam ekonomi pasar.

Jagung datang membawa janji kemakmuran, namun berubah menjadi jebakan struktural. Tanaman ini bukan pilihan ekologis yang bijak, tetapi menjadi satu-satunya pilihan rasional secara ekonomi untuk melunasi utang dan memenuhi kebutuhan hidup. Institusi adat yang dahulu berperan sebagai penyangga moral kini kehilangan legitimasinya. Di satu sisi, otoritas kehutanan negara hadir secara tidak konsisten, mengatur tanpa melindungi, melarang tanpa memberi alternatif. Dalam ruang kosong itu terbentuk struktur kekuasaan yang formal tetapi rapuh. Akibatnya, perusakan ekologis justru menjadi jalan bertahan hidup.

1.5.2. Kesadaran Ekologis yang Lumpuh

Kesadaran ekologis masyarakat Dompu sebenarnya tidak hilang. Mereka menyadari perubahan yang terjadi, melihat dari air yang surut, tanah yang gersang, suhu yang kian berubah. Dalam wawancara, banyak yang mengaitkan kerusakan ini dengan hilangnya keseimbangan moral terhadap alam. Namun, kesadaran itu berhenti di tataran sensorik, merasakan, bukan mengubah. Masyarakat terkhususnya petani tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan siklus tersebut. Jagung tetap ditanam, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena tidak ada pilihan lain yang dianggap masuk akal dalam logika ekonomi.

Hal ini memperlihatkan gap kesadaran, semakin sadar mereka akan krisis, semakin besar pula keterpaksaan untuk terus melanggengkan praktik yang merusak. Dalam dilema ini, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi prioritas utama yang mengalahkan tanggung jawab ekologis. Ungkapan ini memperlihatkan bahwa kesadaran ekologis di Dompu lumpuh bukan karena nihil akan kepedulian terhadap lingkungan, melainkan karena kekuatan eksternal yang membatasi pilihan mereka.

Kasus Dompu menunjukkan adanya krisis epistemik yang unik dimana pergeseran pandangan mendasar masyarakat Dompu terhadap lingkungan. Dikutip dari temuan bahwa pergeseran pandangan masyarakat Dompu terhadap lingkungan bukan hanya soal perubahan

praktik, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara melihat, merasa, dan memperlakukan lingkungan. Dari ruang sakral menjadi ruang produksi. Dari alam sebagai bagian dari diri, menjadi objek ekonomi. Temuan ini membedakan dari beberapa studi lainnya karena menunjukkan bahwa kerusakan adalah hasil dari transformasi ontologis yaitu cara keberadaan alam dimaknai yang didorong oleh kapitalisme agraria, yang pada akhirnya memutus ikatan spiritual dan moral antara masyarakat dengan lingkungan mereka. Studi kasus Dompu bukan tentang bagaimana kearifan lokal melestarikan lingkungan, melainkan tentang bagaimana kearifan lokal dikalahkan oleh kekuatan struktural. Tesis ini berpendapat bahwa deforestasi di Dompu adalah krisis moral dan politik yang menutup akses petani terhadap pilihan ekologis yang adil, menjadikan mereka korban dari sistem yang memaksa mereka menjadi pelaku kerusakan.

1.6. Desain Konseptual

Kajian kualitatif mengenai krisis ekologis seringkali dihadapkan pada godaan untuk menyederhanakan masalah menjadi isu moralitas atau teknis tata ruang semata. Namun, realitas lapangan di Dompu, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa ekspansi monokultur jagung dan degradasi lahan adalah sebuah simpul kompleks dari pertarungan kuasa, pasar, dan pengetahuan yang telah mentransformasi cara masyarakat memaknai dan berinteraksi dengan lingkungan mereka.

1.6.1. Konsep Ekologi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan adalah fenomena ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan vital dan kehidupan sosial ekonomi, yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya alam secara memadai. Eksistensi manusia dan lingkungan hidup dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terus saling memengaruhi (Wardhana, 1999; Riberu, 2002). Interaksi timbal balik ini terbentuk oleh kontribusi dari empat komponen utama, yaitu komponen abiotik (non-hidup), biotik (hidup), sosiokultural (sosial dan budaya), serta upaya konservasi.

Pendekatan evolusioner ekologis terhadap budaya sebagai sistem adaptif merupakan suatu perkembangan penting dalam teori budaya yang muncul untuk menjelaskan interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, budaya dipandang tidak hanya sebagai hasil dari faktor sosial atau sejarah, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi ekologis tertentu yang mempengaruhi kehidupan manusia (Keezing, 1974). Para pemikir kunci dalam pendekatan ini, seperti Leslie White dan Julian Steward, mengemukakan bahwa masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang serupa cenderung mengembangkan kebudayaan yang sama, sehingga adaptasi budaya dapat dilihat sebagai proses evolusi yang berlangsung seiring dengan perubahan kondisi lingkungan.

Bidang Antropologi Ekologi lahir dari upaya menjelaskan interaksi kausal antara kebudayaan manusia dan lingkungan (Steward, 1955). Pendekatan ini terus berkembang, dengan kajian-kajian klasik seperti Orlov (1980) yang berfokus pada hubungan dinamis antara populasi manusia, lingkungannya, dan implikasinya terhadap organisasi sosial dan budaya. Studi ini kemudian membuka jalan bagi kerangka yang lebih spesifik, seperti pendekatan Aksi dan Konsekuensi (Vayda, dalam Lampe dkk., 2005), yang digunakan untuk menganalisis praktik spesifik petani Dompu.

Orlove (1980) membagi perkembangan pemikiran evolusioner/ekologis menjadi tiga tahap yang mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemikiran antropologi. Pada tahap pertama, para tokoh seperti White dan Steward menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan dan kebudayaan, dengan argumen bahwa masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan mereka melalui alat, teknologi, dan pengetahuan. Mereka berpendapat bahwa adaptasi ini merupakan bagian dari evolusi budaya yang bisa berujung pada perkembangan, pertumbuhan, atau bahkan kemunduran, tergantung pada kondisi yang dihadapi.

Masuk ke tahap kedua, munculnya neo-evolusionisme dan neo-fungsionalisme membawa perspektif baru. Neo-evolusionis, seperti Friedman, Carneiro, Service, dan Flannery, berfokus pada asal-usul pertanian, negara, dan kelas sosial, menggali bagaimana struktur sosial dan ekonomi

muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia dalam memanfaatkan sumber daya. Di sisi lain, neo-fungsionalis, termasuk Rappaport, Harris, Hardesty, dan Sweet, melihat organisasi sosial dan kebudayaan sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi mengeksploitasi lingkungan secara efektif tanpa melebihi kapasitas sumber daya yang ada. Untuk menjelaskan stabilitas budaya, digunakanlah konsep sibernetika yang melibatkan mekanisme umpan balik negatif. Melalui lensa ini, kegiatan yang dilakukan manusia dalam ceruk ekologis (ecological niche) mereka dipandang sebagai komponen dari sistem ekologis yang lebih luas. Fokus utama dalam analisis ini adalah mengukur sejauh mana efisiensi energi yang dihasilkan atau digunakan oleh kebudayaan tersebut.

Tahap ketiga, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Orlove, Vayda, dan Bennet, memperkenalkan pendekatan prosedural yang menekankan pemahaman tentang mekanisme perubahan sosial dan budaya. Pendekatan ini mengkritik eksplanasi fungsionalis yang cenderung menafikan pilihan-pilihan sadar individu. Dalam kerangka ini, strategi adaptasi tidak dianggap sebagai proses otomatis, tetapi sebagai pilihan yang diambil oleh individu dalam konteks tujuan yang ingin dicapai. Penekanan pada kognisi dan cara manusia mempersepsi lingkungan mereka menjadi hal yang penting, di mana antropologi kognitif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana ide dan nilai membentuk tindakan manusia.

Selain itu, Little (1999) menambahkan dimensi metodologis dalam pemikiran ekologis dengan membagi perspektif menjadi dua kategori utama: pendekatan fungsionalisme ekologi dan pendekatan action oriented. Pendekatan fungsionalisme ekologi meliputi ekologi budaya, ekosistem, dan pendekatan sistem, sementara pendekatan action oriented berfokus pada proses pengambilan keputusan individu dan perilaku konkret. Ini mencakup pendekatan baru Orlove yang menilai interaksi individu dengan lingkungan serta pendekatan kontekstualisasi progresif Vayda yang menekankan hubungan kausal antara perilaku dan efek yang lebih luas. Pendekatan strategi adaptif Bennet menyoroti kapasitas manusia untuk belajar, beradaptasi, dan melakukan self-objectification.

Dalam kajian Budaya-Ekologis, fokus analisis diletakkan pada proses adaptasi yang dilakukan masyarakat terhadap lingkungannya. Vayda dan Rappaport (dalam Mulyadi, 2007) menguraikan dua dimensi adaptasi manusia, adaptasi fungsional yaitu respons yang diarahkan untuk menjaga stabilitas suatu sistem dan adaptasi prosedural, yang merupakan sistem perilaku yang timbul sebagai hasil adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar. Adaptasi ini sendiri merupakan elemen kunci dalam evolusi budaya, melibatkan serangkaian upaya penyesuaian diri manusia terhadap dinamika lingkungan fisik dan sosial (Arianto, 2012).

Menurut Julian H. Steward (1955: 41-42), mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan memerlukan pertimbangan tiga faktor: (1) Hubungan antara teknologi eksploitasi atau produksi dengan lingkungan hidup. (2) Pengamatan pola perilaku ketika mengembangkan bidang tertentu dengan menggunakan teknik khusus. (3) pengamatan terhadap pola perilaku yang terkait dengan eksploitasi yang mempengaruhi aspek budaya lainnya; yang dimana merupakan tatanan sosial lingkungan yang dapat dilihat secara holistik melalui lapisan pola demografi, pola permukiman, struktur kekerabatan, kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan aspek budaya (Arianto, 2012). Ini merupakan konsep spiritual yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan (Heider, 1972).

Pendekatan holistik terhadap hubungan manusia dan lingkungan berarti mempertimbangkan unsur-unsur dunia kehidupan, biotik dan abiotik, yang diintegrasikan ke dalam sistem sebagai komponen yang relevan (Otto, 2001). Pendekatan analisis holistik diartikan sebagai upaya untuk memasukkan sebanyak mungkin aspek kehidupan, budaya, dan lingkungan suatu masyarakat ke dalam analisis (Steward, 1955).

Rappaport (1968) membawa Antropologi Ekologi ke era ekologi sistem. Melalui studi klasik tentang Tsembaga di Papua Nugini, ia menganalisis budaya ritual babi sebagai mekanisme regulasi yang menjaga keseimbangan antara populasi manusia, populasi babi, dan regenerasi hutan. Rappaport memperkenalkan perspektif fungsionalis-ekologis di mana ritual dan praktik budaya dilihat sebagai homeostat yang menjaga keseimbangan sistem dalam jangka panjang.

Bateson (1979) membawa perspektif sistem sirkular dan siberntik. Ia menekankan bahwa masalah ekologis muncul ketika manusia menggunakan logika linear sebab-akibat sederhana yang mengabaikan hubungan timbal balik dalam sistem yang kompleks. Konsep ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan yang linear hanya fokus pada hasil panen justru menciptakan dampak tidak terduga berupa bencana dan degradasi.

Moran (1990) mengkonsolidasikan konsep-konsep ini menjadi Adaptasi Ekologis (Ecological Adaptation). Ia menekankan bahwa adaptasi adalah proses dinamis yang melibatkan pilihan dan agensi manusia dalam merespons tekanan lingkungan dan sosial-politik. Moran juga menekankan pentingnya studi tentang sistem subsistensi dan pengetahuan lokal sebagai inti dari strategi adaptasi.

Jika kita memandang ekologi budaya sebagai hubungan antara perubahan populasi manusia dan perubahan sifat lingkungan, maka seiring dengan perubahan populasi manusia, kebutuhan hidup manusia juga berubah. Dan seiring dengan perubahan kebutuhan hidup manusia, cara masyarakat memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun ikut berubah. Lebih jauh lagi, ketika sistem memanfaatkan perubahan lingkungan, sifat dan kondisi lingkungan juga berubah. Pada akhirnya, perubahan terakhir ini kemungkinan besar akan mengakibatkan perubahan pada populasi manusia yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri (Otto, 2001).

Fakta ini dapat dilihat pada kasus Kabupaten Dompu, dimana dampak tidak langsung dari pengalihan tanaman pertanian berdampak negatif terhadap aspek sosial-lingkungan seperti akses terhadap sumber air dan cara warga membuang sampah rumah tangga. Terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan penggundulan hutan. Karena lingkungan merupakan sumber kehidupan utama bagi komunitas, Ilmu ekologi ditujukan untuk mempelajari keterkaitan integral antara manusia dan lingkungan. Permasalahan fundamental timbul ketika kebutuhan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam terus bertumbuh. Eskalasi eksploitasi ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan yang memicu konflik, khususnya yang berakar pada perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

Terdapat dinamika interaksi yang kompleks antara Individu, Perilaku, dan Lingkungan yang saling memengaruhi. Perilaku seseorang memberikan kontribusi pada lingkungan dan memengaruhi individu itu sendiri. Tiga kategori faktor yang esensial dalam membentuk perilaku manusia adalah faktor dasar (misalnya, kepercayaan dan pandangan hidup), faktor pendukung misalnya, pendidikan dan strata sosial), dan faktor pendorong misalnya, tokoh masyarakat dan media. Ketiga faktor pembentuk perilaku ini kemudian menciptakan persepsi kejiwaan, mental, dan intelektual, di mana persepsi tersebut berfungsi sebagai basis bagi tatanan perilaku (positif maupun negatif) yang berkelanjutan membentuk lingkungan hidup manusia.

Perilaku merupakan refleksi dari potensi jiwa yang terdapat dalam diri setiap individu, yang berfungsi untuk mereaksi lingkungannya dan segala sesuatu di dalamnya (Ritohardoyo, 2006). Sejauh mana seseorang mampu menyerap informasi sangat bergantung pada dimensi kejiwaan dan cara ia mempersepsikan lingkungan, yang kemudian tercermin dalam pola tindakannya. Perilaku ini dapat diarahkan sebagai respons terhadap manusia, organisme lain, benda mati, atau konsep-konsep tertentu. Walaupun merupakan manifestasi individual, perilaku sosial selalu terikat dan dipengaruhi oleh keadaan psikis individu, unsur fisik, dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam lingkungannya.

Fenomena ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Dompu menciptakan tantangan signifikan bagi masyarakat. Kehadiran perusahaan-perusahaan baru, terutama di sektor komoditas seperti jagung dan pertambangan, membawa peluang ekonomi yang menarik. Namun, hal ini juga memunculkan risiko kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan ekosistem lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya menjadi sangat penting. Masyarakat harus menghadapi dilema antara keuntungan jangka pendek dari pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang lingkungan mereka. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya yang bijak menjadi sangat krusial. Hal ini mendorong

masyarakat untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam beradaptasi, seperti praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan konservasi sumber daya air.

Pembahasan ekologi dari sudut pandang antropologi telah berkembang pesat sejak lama. Teori Antropologi Ekologi mengalami proses evolusi signifikan, bermula dari diperkenalkannya ekologi budaya (cultural ecology), kemudian dikritisi dan diikuti oleh pendekatan fungsionalisme ekologi (pendekatan sistem), hingga akhirnya muncul pendekatan aktor. Seluruh perkembangan orientasi teoritis dan metodologi ini bertujuan mengarahkan analisis ekologi agar menjadi multidisipliner dan memiliki orientasi praktis yang lebih kuat dalam menjawab persoalan pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara antropologi ekologi dengan sosiologi lingkungan dan ekonomi politik menjadi semakin jelas, namun disiplin ini tetap teguh berpijak pada basis analisis dasarnya, yakni kebudayaan.

Sebagai disiplin ilmu, Antropologi Ekologi bertugas menganalisis relasi antara komunitas dan lingkungannya melalui sudut pandang masyarakat lokal (Saharuddin dalam Adiwibowo, 2007). Pendekatan Ekologi Budaya yang dirumuskan oleh Steward menjadi dasar bagi analisis Geertz (1963) mengenai transisi ekologis di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam karyanya *Agricultural Involution*. Karena Geertz mengambil pemikiran Steward sebagai landasan, keduanya memiliki kesamaan tidak hanya dalam penggunaan istilah, tetapi juga dalam menekankan konsep inti budaya (cultural core). Kedua tokoh ini juga sama-sama memprioritaskan studi mengenai perubahan budaya dan implikasinya di tengah masyarakat.

Analisis relasi manusia-lingkungan juga dilakukan oleh Rapaport dan Vayda, yang mencakup wilayah studi di Indonesia. Terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka dibandingkan dengan Steward dan Geertz. Sementara Steward dan Geertz cenderung menggunakan metode komparatif pada skala masyarakat yang lebih luas, Rapaport dan Vayda berfokus pada komunitas kecil. Tujuan utama mereka adalah melakukan penggalian mendalam terhadap interaksi manusia-lingkungan, terutama untuk memahami keterkaitannya dengan upaya menjaga keseimbangan ekologi dalam komunitas tertentu.

Antropologi Ekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji penggunaan sumber daya alam oleh manusia serta bagaimana penggunaan tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial dan nilai budaya dari perspektif warga setempat, yang tercermin dalam perilaku yang diperlihatkannya (Bennett, 1969). Oleh karena itu, objek studi disiplin ini adalah cara pandang dan tindakan (perilaku) aktor dalam berinteraksi dengan lingkungan (baik alam maupun sosial) sebagai manifestasi dari pola kebudayaannya (Saharuddin dalam Adiwibowo, 2007). Analisis Antropologi Ekologi berpegang teguh pada sejumlah konsep pokok, yaitu ekosistem, sistem sosial budaya, adaptasi, dan keseimbangan dinamis.

Relasi antara manusia dan lingkungan merupakan proses yang dinamis dan kompleks, yang didorong oleh interaksi tiga arah antara faktor budaya, lingkungan fisik, dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan memanfaatkan pendekatan ekologis, dimungkinkan untuk memahami mekanisme adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu dalam menganalisis tantangan yang dihadapi individu dalam menyeimbangkan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pelestarian lingkungan.

Antropologi Ekologi membantu memahami mengapa pergeseran pandangan (dari alam sebagai ruang sakral menjadi objek produksi) menjadi prasyarat bagi deforestasi. Ia menyoroti bagaimana nilai utang dan prestise sosial telah menjadi 'inti budaya' baru yang mendorong praktik monokultur jagung. Analisis ini memungkinkan penafsiran bahwa krisis Dompu adalah kegagalan adaptasi karena sistem budaya ekonomi dan politik yang gagal merespons tekanan baru yakni pasar dan kebijakan dengan strategi yang lestari dalam hal ini yakni diversifikasi, penguatan komoditi lain, melainkan merespons dengan strategi yang destruktif yaitu ekstensifikasi jagung.

Dengan demikian, Antropologi Ekologi memberikan konteks historis dan konseptual untuk kemudian diperdalam oleh Ekologi Politik, di mana budaya tidak hanya beradaptasi dengan alam, tetapi juga berinteraksi dengan struktur kekuasaan dan pasar yang membentuk pilihan-pilihan ekologis mereka.

1.6.2. Konsep Ekonomi Moral dan Rasionalisasi Petani

Konsep ekonomi moral merupakan sumbangan penting dari James C. Scott (1976) dalam memahami perilaku ekonomi petani tradisional di Asia Tenggara. Melalui karyanya *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Scott menolak pandangan ekonomi neoklasik yang melihat petani sebagai aktor rasional yang berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, petani kecil beroperasi dalam kerangka moral yang berbeda, kerangka yang menempatkan keamanan hidup minimum sebagai prioritas tertinggi. Dalam masyarakat agraris tradisional, tindakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh logika pasar, tetapi juga oleh norma sosial, solidaritas komunal, dan rasa keadilan distributif.

Scott (1976) memperkenalkan konsep *subsistence ethic*, yakni etika bertahan hidup yang menjadi landasan moral bagi perilaku ekonomi petani. Prinsip ini menegaskan bahwa yang terpenting bagi petani bukanlah meraih keuntungan sebesar-besarnya, melainkan menghindari risiko kehilangan sumber penghidupan minimum. Dalam konteks ini, rasionalitas petani tidak identik dengan *profit maximization*, tetapi dengan *risk minimization*. Ia akan memilih strategi produksi yang paling aman secara sosial dan ekologis, bahkan jika hasil ekonominya rendah. Etika ini sekaligus menjadi bentuk resistensi terhadap sistem ekonomi yang tidak adil, di mana ketimpangan harga, eksploitasi tengkulak, atau monopoli pasar dianggap melanggar tatanan moral masyarakat.

Dalam pengembangan lebih lanjut, Scott mengemukakan prinsip *safety-first rationality*, yaitu pola pengambilan keputusan yang didominasi oleh ketakutan akan kemungkinan “jatuh di bawah garis subsistensi”. Ketakutan ini membentuk orientasi moral yang kuat, di mana setiap keputusan ekonomi selalu diukur berdasarkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Rasionalitas semacam ini bersifat moral sekaligus ekologis, karena secara ideal mendorong petani untuk menghindari risiko ekstrem yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup mereka (Scott, 1976). Dari perspektif ini, keberlanjutan ekologis bukan semata persoalan teknis, melainkan bagian dari kewajiban moral untuk menjaga fondasi kehidupan jangka panjang.

Aspek penting lain dari ekonomi moral adalah konsep keadilan harga. Scott berpendapat bahwa petani memiliki persepsi moral tersendiri mengenai apa yang dianggap sebagai “harga yang adil”. Ketika harga hasil pertanian jatuh di bawah ambang kelayakan hidup, situasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran moral terhadap hak hidup petani (Scott, 1976, p. 3). Dalam konteks agraris Asia Tenggara, keadilan harga berkaitan erat dengan legitimasi sosial pasar dan negara. Intervensi negara, peran tengkulak, maupun kebijakan pasar dievaluasi berdasarkan sejauh mana aktor-aktor tersebut menjaga atau melanggar norma keadilan moral tersebut.

Pemikiran Scott ini memiliki kedekatan konseptual dengan gagasan Karl Polanyi (1944) tentang *embeddedness* ekonomi dalam tatanan sosial. Polanyi menegaskan bahwa ekonomi pada dasarnya selalu terlekat dalam relasi sosial, moral, dan politik. Ketika pasar dilepaskan dari nilai-nilai sosial—melalui proses *disembedding*—maka yang muncul bukanlah efisiensi semata, melainkan krisis sosial dan moral. Dalam konteks Dompu, proses disembedding ini tampak jelas ketika pasar jagung dikendalikan oleh tengkulak dan industri besar, sementara petani kehilangan kendali atas harga dan distribusi hasil produksi. Pasar tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang interaksi sosial, melainkan sebagai sumber ketidakpastian dan ketidakadilan moral.

Konsep moral ecology ini membantu menjelaskan fenomena di Dompu, di mana petani tidak menolak tanggung jawab ekologis, tetapi menempatkannya dalam hierarki moral yang berbeda. Menyelamatkan keluarga dari kelaparan dianggap sebagai kewajiban moral tertinggi, bahkan jika itu berarti merusak alam. Di sisi lain, rasa bersalah terhadap alam tetap hadir dalam kesadaran ekologis mereka, misalnya dalam ungkapan nostalgia tentang masa ketika udara masih sejuk dan hutan masih rimbun. Dalam konteks ini, moralitas ekologis bekerja bukan dalam bentuk larangan mutlak, tetapi dalam bentuk negosiasi nilai antara tanggung jawab sosial dan kesadaran ekologis.

Namun demikian, pendekatan ekonomi moral Scott tidak luput dari kritik. Samuel L. Popkin, dalam karyanya *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*,

mengajukan kritik mendasar terhadap apa yang ia anggap sebagai romantisasi petani dalam ekonomi moral. Popkin (1979) menolak pandangan yang melihat petani terutama sebagai aktor yang menghindari risiko dan terikat kuat pada norma kolektif. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa petani merupakan aktor rasional yang mampu melakukan kalkulasi strategis terhadap risiko dan peluang ekonomi, serta bersedia mengambil risiko tinggi apabila terdapat insentif yang jelas dan institusi sosial tidak menyediakan jaminan keamanan yang memadai.

Dalam kerangka Popkin, pengambilan risiko bukanlah penyimpangan dari rasionalitas petani, melainkan bagian inheren dari strategi bertahan hidup dalam situasi ketidakpastian struktural. Popkin menunjukkan bahwa petani sering kali bersedia melampaui norma kolektif atau pertimbangan ekologis jangka panjang apabila tindakan tersebut dipandang dapat meningkatkan peluang kesejahteraan rumah tangga. Rasionalitas petani, dalam perspektif ini, bersifat kalkulatif dan berorientasi pada peluang, bukan semata-mata pada keamanan subsistensi.

Konsep *household investment logic* yang dikemukakan Popkin sangat relevan untuk membaca dinamika ekonomi petani di Dompu. Dalam logika ini, keputusan ekonomi rumah tangga tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk membuka peluang mobilitas sosial di masa depan, seperti pendidikan anak, akumulasi aset, atau peningkatan status sosial. Jagung, dalam konteks Dompu, berfungsi sebagai komoditas yang relatif cepat menghasilkan uang tunai (*cash-in-hand*), sehingga dipersepsikan sebagai instrumen investasi yang rasional, meskipun mengandung risiko ekologis yang tinggi.

Pengambilan risiko ekologis—termasuk pembukaan hutan dan pengolahan lahan curam—dapat dipahami sebagai bentuk *rational risk-taking under uncertainty* (Popkin, 1979). Risiko kerusakan lingkungan jangka panjang dianggap lebih dapat ditoleransi dibandingkan risiko ekonomi langsung seperti kelaparan, utang, atau kegagalan memenuhi kewajiban sosial keluarga. Dalam kondisi di mana pilihan ekonomi semakin menyempit dan perlindungan negara lemah, rasionalitas kalkulatif ini menjadi strategi dominan yang membentuk tindakan petani.

Popkin juga menekankan bahwa norma kolektif dan institusi komunal akan melemah ketika tidak lagi memberikan keuntungan nyata bagi individu. Solidaritas desa, institusi adat, maupun mekanisme perlindungan sosial akan ditinggalkan apabila dianggap tidak mampu menjamin keamanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini relevan dengan konteks Dompu, di mana ketidakjelasan pengelolaan hutan, inkonsistensi kebijakan, dan dominasi pasar komoditas telah menormalisasi praktik ekstensifikasi lahan sebagai strategi individual yang sah. Hutan tidak lagi dipahami terutama sebagai ruang moral, melainkan sebagai sumber daya terbuka yang dapat diakses demi kelangsungan hidup.

Dengan demikian, kasus Dompu menunjukkan bahwa ekonomi moral dan rasionalitas kalkulatif tidak dapat dipertentangkan secara biner. Etika subsistensi ala Scott menjelaskan landasan moral dan emosional dari tindakan petani, sementara pendekatan Popkin membantu memahami mengapa petani bersedia melampaui batas-batas ekologis ketika tekanan struktural semakin intens. Kesadaran ekologis tidak hilang, tetapi dikalahkan oleh logika investasi rumah tangga yang menuntut hasil cepat dan nyata.

Dalam perspektif antropologi ekologi, temuan ini sejalan dengan gagasan Kay Milton (2002) dalam *Loving Nature, Towards an Ecology of Emotion*. Milton menekankan bahwa perilaku ekologis manusia selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai emosional, moral, dan sosial yang melekat pada kebudayaan mereka. Dengan kata lain, etika lingkungan tidak bersifat universal, tetapi terbentuk melalui pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungan lokalnya. Tentang *moral ecology*, yang menekankan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan selalu dimediasi oleh nilai moral, emosi, dan pengalaman sosial. Moralitas ekologis masyarakat Dompu tidak lenyap, tetapi bergeser dalam hierarki nilai, menempatkan tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga di atas tanggung jawab ekologis jangka panjang. Pergeseran ini bukan cerminan ketidakpedulian, melainkan hasil dari negosiasi moral di bawah tekanan struktural.

Sedangkan dalam terminologi Vayda dan Walters (1999), kondisi ini dapat dipahami sebagai *rationality under constraint*, yakni rasionalitas yang dibentuk oleh keterbatasan pilihan ekonomi, politik, dan ekologis. Struktur pasar yang tidak adil, kebijakan pertanian yang berorientasi

pada komoditas tunggal, serta absennya perlindungan ekologis negara menciptakan situasi di mana pilihan ekologis yang berkelanjutan menjadi hampir mustahil. Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan Scott (1985), petani mengalami apa yang dapat disebut sebagai “tragedi moral”, di mana mereka dipaksa melanggar nilai-nilai ekologisnya sendiri demi mempertahankan hidup.

Oleh karena itu, kerusakan ekologis di Dompu tidak dapat dipahami sebagai kegagalan moral atau rasionalitas petani, melainkan sebagai produk dari interaksi kompleks antara etika subsistensi, rasionalitas kalkulatif, dan struktur ekonomi-politik yang timpang. Pemulihan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis semata, tetapi harus disertai dengan pemulihan ekonomi moral dan restrukturisasi insentif ekonomi, sehingga petani memiliki ruang nyata untuk bertindak sesuai dengan kesadaran ekologis yang sebenarnya telah mereka miliki.

Maka, pemulihan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis seperti reboisasi atau konservasi, tetapi harus disertai dengan pemulihan ekonomi yang dimana menegakkan keadilan harga, menyediakan pasar bagi tanaman alternatif, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang adil. Dalam konteks ini, ekonomi moral menjadi jembatan antara etika, ekologi, dan kebijakan, suatu kerangka yang memungkinkan masyarakat untuk hidup secara bermoral di dunia yang menuntut pilihan-pilihan sulit.

1.6.3. Konsep Ekologi Politik

Jika Antropologi Ekologi berfokus pada adaptasi budaya terhadap lingkungan, maka Ekologi Politik menggeser fokus ke kekuasaan, konflik, dan ketidakadilan yang memediasi hubungan antara manusia dan alam. Ekologi Politik berargumen bahwa kerusakan lingkungan adalah bukan sekadar hasil dari praktik lokal yang salah, melainkan produk dari kekuatan struktural yang lebih luas, seperti kebijakan negara, dinamika pasar, dan relasi kekuasaan.

Pengamat manapun yang menyaksikan krisis lingkungan yang tak kunjung usai di Indonesia, mulai dari deforestasi berkelanjutan yang menghilangkan puluhan juta hektar hutan (seperti 47 juta ha yang rusak), penyusutan drastis lahan bakau (dari 5 juta ha menjadi 2 juta ha dalam seperempat abad), dampak buruk pertambangan dan migas, pencemaran lahan akibat ekspansi sawit yang intensif bahan kimia, hilangnya RTH perkotaan yang berganti menjadi fasilitas komersial, hingga polusi udara di kota besar, akan segera menyimpulkan bahwa ketidakmampuan negara dalam menanggulangi bencana ekologis ini bukan disebabkan oleh kegagalan teknis, melainkan oleh kegagalan politik. Kesimpulan ini berlaku universal, baik untuk kasus-kasus di Indonesia termasuk yang disorot dalam penelitian ini maupun di negara-negara lain.

Tidak ada solusi yang mungkin berhasil untuk masalah lingkungan jika pendekatan yang diambil bersifat elitis, eksklusif, sektoral, dan hanya teknokratis. Keberhasilan penanganan lingkungan sangat bergantung pada pengintegrasian faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan akar penyebab kerusakan sumber daya. Oleh karena itu, seperti yang ditekankan oleh Neumann (2005:8), "semua masalah ekologi sebenarnya merupakan masalah politik dan ekologi, sosial dan biofisik sekaligus," menunjukkan bahwa setiap isu ekologis membawa serta dimensi kekuasaan dan struktur sosial.

Selain konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial politik dalam analisis ini. Ekologi politik, yang mulai muncul pada dekade 1980-an, menekankan pentingnya integrasi antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan mendorong pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu disiplin ilmu sosial, Antropologi jelas tidak dapat mengabaikan isu krusial yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun terdapat beragamnya perspektif teoretis yang tersedia untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan, suatu kondisi yang sering kali membingungkan peneliti dalam menentukan pilihan, penelitian ini akan mengambil jalur tegas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan bersandar pada dua kerangka utama: pandangan Ekologi Politik dan interpretasi budaya yang merupakan basis analisis umum dalam kajian Antropologi mengenai kerusakan lingkungan.

Kerangka Ekologi Politik berkembang seiring waktu, bergerak dari analisis tentang degradasi lahan menuju analisis tentang kerentanan sistemik, Degradasi Lahan dan Rantai Penjelasan (Blaikie & Brookfield): Piers Blaikie dan Harold Brookfield (1987) meletakkan dasar Ekologi Politik dengan konsep "Rantai Penjelasan" chain of explanation. Mereka menolak pandangan yang menyalahkan petani miskin secara langsung. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa praktik penggunaan lahan yang merusak di tingkat lokal (penyebab proksimal) adalah konsekuensi dari tekanan struktural yang lebih besar (penyebab mendasar), seperti kebijakan pemerintah yang timpang, tekanan pasar global, dan ketidakamanan kepemilikan lahan.

Richard Peet dan Michael Watts (1996) mengkonsolidasikan Ekologi Politik dengan penekanan yang lebih kuat pada teori sosial kritis. Mereka menganalisis bagaimana kapitalisme global, melalui proses akumulasi dan ekstraksi sumber daya, menciptakan kerentanan struktural yang tak terhindarkan bagi masyarakat subsisten. Konflik lingkungan dipandang sebagai arena pertarungan kelas dan kekuasaan. Kemudian, salah satu pendekatan yang relevan dalam Ekologi Politik adalah kerangka Interpretasi Budaya (Cultural Interpretive). Pendekatan ini menempatkan perhatian utama pada upaya mendapatkan pandangan emik dari masyarakat (Baer & Singer, 2014). Pandangan emik tersebut mencakup unsur-unsur kognitif lokal seperti persepsi, nilai-nilai, dan pengetahuan mereka. Di Indonesia, berbagai penelitian yang berfokus pada penggalian kearifan lokal (local wisdom) dalam konteks penanganan bencana atau pengelolaan lingkungan merupakan contoh penerapan langsung dari kerangka teoretis ini.

Ekologi Politik, yang dikelompokkan sebagai bagian dari Antropologi Kritis, adalah pendekatan transdisipliner yang mulai diperkenalkan pada era 1970-an. Evolusinya bermula dari Ekologi Budaya dan kemudian dipengaruhi secara signifikan oleh teori-teori ekonomi politik Marxis, yakni Teori Ketergantungan dan Teori Sistem Dunia. Inti pengaruh dari kerangka-kerangka ini adalah untuk memastikan Ekologi Politik selalu menitikberatkan perhatian pada isu ketimpangan (inequality) yang merupakan faktor penentu dalam memahami hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Pada dekade 1970-an, fokus utama para ahli Ekologi Politik adalah menyanggah kerangka Neo-Malthusian (Bryant, 1992), yang cenderung menawarkan penjelasan apolitis dengan menunjuk pertumbuhan populasi sebagai penyebab utama degradasi lingkungan di Dunia Ketiga. Melawan pandangan tersebut, Ekologi Politik berupaya menunjukkan bahwa akar permasalahan kerusakan lingkungan bukanlah faktor demografi. Sebaliknya, krisis ekologis merupakan dampak langsung dari praktik eksploitasi alam yang terikat kuat pada sistem produksi kapitalis yang berlaku.

Pendekatan Ekologi Politik secara tegas menyoroti berbagai hubungan kekuasaan yang secara langsung memengaruhi pemanfaatan dan kerusakan sumber daya alam, serta proses yang memfasilitasi eksploitasi dan pemulihan lingkungan. Analisis ini diperdalam oleh perspektif Neo-Marxis, yang menambahkan pertimbangan mengenai peran birokrasi, Negara, kebijakan publik, dan aktor-aktor berpengaruh lainnya dalam mengubah lingkungan (Baer & Singer, 2014; Roberts, 2020).

Berbagai struktur sosial, politik, dan ekonomi secara kolektif menguasai alam dan tenaga kerja. Ekologi Politik berfokus secara khusus pada pertanyaan sentral: siapa pihak yang diuntungkan oleh perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan bagaimana alokasi sumber daya who gets what from whom terjadi di tengah perubahan tersebut. Robbins (2012) menambahkan, premis utama perspektif ini adalah bahwa interaksi ekonomi terjadi tidak hanya antar-manusia, tetapi juga antara manusia dengan objek fisik dan sistem entitas non-manusia yang turut membentuk relasi sosial dan kultural.

Kontribusi utama Ekologi Politik dapat disederhanakan menjadi dua fokus mendasar (Robbins 2003; Neumann 2005): Pertama, Ekologi Politik menitikberatkan perhatian pada Skala. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk mengidentifikasi rantai koneksi yang merangkai dinamika lingkungan dengan kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi di berbagai tingkatan lokasi. Kedua, Ekologi Politik secara konsekuen berfokus pada Kekuasaan. Kekuasaan dalam berbagai wujudnya dianggap sebagai elemen kunci untuk menafsirkan bagaimana konsep-konsep mengenai keberlanjutan dibentuk, dinegosiasikan, dan disebarkan dalam masyarakat.

Para ahli lingkungan mulai merumuskan bidang Ekologi Politik dengan mengadopsi konsep-konsep ekonomi politik yang bersifat materialis dan strukturalis. Pendekatan baru ini efektif dalam memperjelas keterkaitan antara dinamika lingkungan di tingkat setempat dengan proses politik dan ekonomi yang skalanya lebih luas (Peet and Watts, 1996; 2004). Terobosan analitis ini sangat berharga karena memungkinkan pelacakan kaitan mendalam, seperti hubungan antara degradasi tanah lokal dengan permasalahan global/nasional yang lebih besar, misalnya kemiskinan, marjinalisasi politik/ekonomi, keterbelakangan, ketidakmampuan memiliki lahan, dan hubungan neo-kolonial (Blaikie and Brookfield, 1987).

Pola pengembangan sumber daya, menurut temuan utama Ekologi Politik, selalu merupakan hasil dari interaksi antara sistem alam misalnya kuantitas air dan sistem sosial (misalnya bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi terdistribusi dalam masyarakat). Oleh karena itu, studi Ekologi Politik, yang berakar dari studi pembangunan kritis, menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dipahami semata-mata dari aspek teknis atau efisiensi. Sejalan dengan itu, Adams (1990: 253) berpandangan bahwa orientasi lingkungan 'kehijauan' dalam pembangunan sesungguhnya berkaitan dengan masalah kekuasaan, kedaulatan, dan kendalian, bukan hanya ekologi murni.

Ekologi Politik lebih tepat digambarkan sebagai 'pendekatan teori' alih-alih 'teori', dengan kategori konseptual yang diperkaya dari disiplin Antropologi dan Geografi. Meskipun telah berhasil memperdalam analisis perubahan lingkungan kontemporer, EP juga menuai kritik. Mengingat sifatnya yang integratif dan lintas-disiplin, kritik yang muncul sering berpusat pada klaim 'terlalu banyak' atau 'tidak cukupnya' suatu komponen konseptual tertentu. Kritik yang signifikan datang dari pengamat seperti Vayda dan Walters (1999) serta Zimmerer (2000), yang menilai EP terlalu condong ke analisis kekuasaan sehingga mengabaikan pemahaman ekologi yang rinci. Kritik ini diperkuat oleh Walker (2005) yang mempertanyakan kapabilitas 'ekologis' EP, dengan argumen bahwa pendukungnya terlalu asyik mengkaji struktur sosial dan kurang memedulikan dokumentasi perubahan lingkungan yang tidak selalu berasal dari faktor ekonomi atau politik.

Di sisi yang berlawanan, ilmuwan, terutama dari bidang geografi mengkritisi sejumlah teks klasik ekologi politik karena dianggap kurang terpolitisasi. Kritik ini merujuk pada ketidakmampuan teks tersebut memberikan perhatian eksplisit pada 'politik' dalam konteks Marxis, yaitu kritik terhadap kapitalisme. Contohnya, Peet dan Watts mengkritik karya kunci Piers Blaikie, *Land Degradation and Society*, karena dianggap terlalu fokus pada isu lahan atau tanah dan mengabaikan masalah pembangunan kapitalis di wilayah pinggiran. Selain itu, penulis lain menyoroti masalah relevansi kebijakan Ekologi Politik (Neumann 2008), dengan menekankan pentingnya menghasilkan wawasan yang bermanfaat tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Perdebatan internal mengenai kurangnya sistematika dalam disiplin ini belum menemukan titik terang, sehingga konsensus umum sering diwakili oleh deskripsi Robbins (2004:13) bahwa Ekologi Politik hanyalah "sesuatu yang dilakukan orang" ("*something people do*").

Suatu pendekatan lahir antara lain karena kerangka konseptual yang sebelumnya digunakan untuk mengkaji suatu persoalan atau fenomena dianggap mengandung sejumlah kelemahan. Begitu pula dengan kerangka pendekatan ekologi politik. Antropologi dan geografi budaya adalah dua disiplin ilmu yang banyak berkontribusi pada awal lahirnya pendekatan Ekologi Politik. Sebelumnya, dikenal pendekatan Ekologi-Budaya, Ekologi-Manusia atau yang dalam antropologi masuk dalam kajian antropologi ekologi. Umumnya pendekatan sebelum ekologi politik ini menggunakan paradigma ekologi dalam hal ini ecosystem approach dan evolusi biologi sebagai kerangka dasar untuk menjelaskan bagaimana relasi manusia dengan lingkungannya di suatu tempat.

Perspektif Ekologi Budaya mengalami transisi dari menggunakan kebudayaan sebagai unit analisis utama ke penggunaan ekosistem. Dalam kerangka ekosistem, manusia dipandang sebagai bagian dari jaring-jaring makanan dan analisis sering dilakukan dengan mengamati aliran energi (Paulson dkk, 2005). Kajian yang umumnya mikro-konteks ini berfokus pada strategi adaptasi manusia dan makhluk lain terhadap lingkungan.

Pada awal 1980-an, muncul Ekologi Manusia sebagai upaya awal untuk melepaskan diri dari paradigma dasar ekologi dan evolusi biologi. Tokoh sentralnya adalah Andrew Vayda, yang memperkenalkan pendekatan "Progressive Contextualization" (Vayda, 1983). Di Indonesia, Profesor Vayda bersama Dr. Kuswata (LIPI) dikenal sebagai pionir kajian Ekologi Manusia, terutama melalui studi mereka mengenai masyarakat peladang berpindah di Kalimantan. Murid-murid mereka kemudian meneruskan pengajaran mata kuliah Ekologi Manusia di sejumlah universitas di Indonesia. Sebagian dari peneliti sosial yang saat ini dikenal dengan pendekatan ekologi politiknya, di awal karir mereka juga menggunakan pendekatan yang ditawarkan Vayda ini sebagai titik masuk pengenalan mereka dengan Ekologi Politik. Namun, sementara peneliti lain mengembangkan terus pendekatan yang di rintis Vayda dan bahkan dalam perjalanannya kemudian mereka meninggalkan sama sekali penggunaan Progressive Contextualization" dalam analisis mereka, profesor Vayda, sebaliknya, tetap konsisten dengan pandangannya dan menjadi salah satu pengkritik yang paling gigih dari pendekatan yang saat ini kita kenal sebagai ekologi politik (Vayda dan Walter 1999).

Kajian tentang sistem peladang di Kalimantan yang oleh peneliti disebut sebagai perladangan bergilir untuk menghindari miskonsepsi, tidak hanya menginspirasi kalangan peneliti ekologi dan sosial, tetapi juga memberi dorongan signifikan bagi organisasi lingkungan pada 1980-an. Penelitian Vayda dan Kuswata yang menunjukkan pola perladangan khas masyarakat di hutan tropis Kalimantan menjadi basis argumen untuk membela kelompok yang dicap 'perambah hutan', dan pada akhirnya melahirkan gerakan pembelaan hak-hak masyarakat adat. Meskipun demikian, berbeda dengan Ekologi Manusia yang mapan, Ekologi Politik tertinggal jauh dalam pengenalannya di Indonesia, baru muncul di akhir 1990-an setelah kejatuhan Soeharto pada 1998. Situasi ini erat kaitannya dengan latar belakang pemikiran kritis yang menginspirasi EP, yang tidak dapat diterima secara politik di era Orde Baru.

Menurut Watts (2003) dan Robbins (2004), dorongan utama lahirnya Ekologi Politik adalah minat baru yang signifikan pada dekade 1970-1980-an di kalangan ilmuwan sosial untuk mengkaji ulang karya Karl Marx dan aplikasinya terhadap perubahan lingkungan. Pada periode ini, kerangka evolusi biologi dan pendekatan ekosistem dianggap tidak memadai. Sejumlah penelitian misalnya (Blaikie, 1985) memperlihatkan bahwa isu lingkungan seperti erosi tanah adalah isu politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Blaikie dan Brookfield (1987) mendefinisikan EP secara ringkas sebagai "analisis yang memperhatikan ekologi dan ekonomi politik secara luas" (political ecology is the concerns of ecology and broadly defined political economy). Konsep ekonomi-politik ini secara langsung berasal dari kajian Marx tentang relasi sosial dalam kapitalisme.

Ekologi Politik secara sadar tidak dimasukkan dalam pengajaran ilmu lingkungan selama masa Orde Baru karena alasan politis: paradigma Marxis dianggap identik dengan komunisme dan merupakan ancaman terhadap negara, yang dapat mengakibatkan tuduhan penyebaran PKI. Sensor kurikulum ini juga membatasi atau menghilangkan kajian-kajian kritis Marxis lainnya seperti central and periphery dan world-system theory di berbagai ilmu sosial, termasuk menghapus studi politik agraria yang berbasis ekonomi-politik Marxis yang pernah populer di fakultas pertanian pada 1970-an. Barulah setelah Reformasi pada akhir 1990-an, semangat untuk membaca dan menerjemahkan karya Karl Marx kembali bangkit di kalangan intelektual muda Indonesia.

Paradigma Marxis yang awalnya bersifat struktural dan deterministik kini telah diperbaiki, dengan perkembangan kajian yang lebih menghargai peran agensi atau aktor aktif yang sebelumnya dianggap simplistik (Hefner, 1999). Kontribusi penting datang dari Antonio Gramsci (1971), yang mengembangkan konsep hegemoni selama ia dipenjara. Kajian Gramscian ini kini menjadi fondasi untuk menjelaskan bagaimana gerakan perlawanan muncul atau gagal melawan ide-ide yang menindas. Lebih lanjut, konsep hegemoni penting untuk menganalisis secara kritis wacana, ide, dan gagasan dominan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap masalah dan fenomena yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan.

Paradigma Gramscian mengajarkan bahwa gerakan sosial tidak hanya melibatkan kekuatan fisik tetapi juga memiliki dimensi kultural. Perlawanan yang efektif harus terjadi di ranah simbolik, menantang ide, wacana, dan paradigma dominan. Terkait hal ini, Ekologi Politik

terinspirasi oleh pendekatan Post-Strukturalis Michael Foucault yang menggarisbawahi kesatuan pengetahuan/kekuasaan. Implikasi ini membawa EP untuk mengkaji secara kritis produksi pengetahuan mengenai lingkungan, mempertanyakan otoritas yang membuatnya, prosesnya, dan siapa yang memiliki kontrol atas pengetahuan tersebut (Watts, 2003).

Awalnya, agenda EP berfokus pada perubahan lingkungan di Dunia Ketiga. Dalam konteks ini, peneliti EP menolak paradigma Malthusian yang secara simplistik menyalahkan pertumbuhan penduduk sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dengan alasan bahwa penjelasan tersebut tidak cukup komprehensif (Robbins, 2004; Schubert, 2005).

Kerusakan yang meluas pada hutan tropis Amazon tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk yang dikemukakan Malthus. Sebaliknya, hal itu merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor struktural yang kompleks (Hecht, 1985). Faktor-faktor tersebut meliputi: peningkatan permintaan daging sapi di Amerika Utara; kebijakan pemerintah Brazil saat itu yang memberikan insentif seperti pengurangan pajak bagi pemodal besar untuk membangun peternakan sapi skala ekspor; tindakan rezim yang berkuasa di Brazil yang memberikan hak penguasaan lahan hutan kepada elite domestik demi menjaga legitimasi; dan aktivitas spekulasi tanah yang membuka hutan untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga lahan.

Ekologi Politik secara eksplisit menolak narasi yang menuduh bahwa praktik dan teknologi tradisional yang digunakan masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah penyebab utama kerusakan hutan tropis (Robbins, 2004). Penelitian EP justru menunjukkan bahwa pola perladangan bergilir yang dianut secara turun-temurun tidak mendorong kerusakan dan bahkan menyerupai struktur ekosistem hutan, sehingga tidak mengurangi keanekaragaman hayati. Sebaliknya, para pengkaji EP menuduh bahwa introduksi teknologi modern dari Barat seperti gergaji mesin dan monokultur justru mendorong kerusakan lingkungan yang meluas.

Selain itu, EP menyanggah pandangan bahwa integrasi sistem pertanian ke pasar global selalu menghasilkan kesejahteraan petani atau efisiensi lingkungan. Seringkali yang terjadi adalah sebaliknya: petani menjadi rentan terhadap fluktuasi harga. Lebih lanjut, kenaikan harga komoditas internasional justru menjadi pendorong utama pembukaan lahan hutan yang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan kerusakan lingkungan di Dunia Ketiga (Robbins, 2004).

Ekologi Politik menegaskan bahwa perubahan lingkungan tidak bisa dipahami hanya melalui kajian proses-proses di tingkat lokal saja. Sebaliknya, perubahan tersebut adalah gabungan interaksi antara proses sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat lokal dan non-lokal, yang keduanya memengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam di suatu wilayah (Blaikie, 1985). Menurut Blaikie (1985), faktor-faktor yang berpengaruh di tingkat lokal meliputi: pengambilan keputusan di dalam unit-unit sosial keluarga atau komunitas, peran institusi lokal seperti aturan adat dan sistem tenurial yang mengatur akses sumber daya; proses marginalisasi lokal misalnya, masyarakat terdesak ke dataran tinggi karena perusahaan menguasai dataran rendah, relasi produksi di atas lahan; serta kondisi fisik dan karakteristik dasar dari sumber alam itu sendiri.

Faktor-faktor non-lokal yang memengaruhi perubahan lingkungan di suatu lokasi sangat beragam. Hal tersebut meliputi: kebijakan pemerintah terkait penguasaan dan alokasi sumber daya; perjuangan aktor untuk memengaruhi kebijakan akses dan kontrol; harga komoditas di pasar internasional dan nasional; kebijakan pajak; serta proses perubahan agraria seperti komersialisasi dan akumulasi modal. Semua ini membuktikan bahwa perubahan lingkungan merupakan hasil perpaduan faktor kompleks lintas skala. Untuk menganalisis kompleksitas ini, pengkaji Ekologi Politik (EP) berupaya melakukan tiga hal utama: Analisis Lintas-Skala: Menelusuri proses sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional yang memengaruhi akses dan kontrol sumber daya (Robbins, 2004; Willhusen, 2004). Analisis Historis: Melakukan penelusuran ke belakang untuk memahami struktur politik dan ekonomi masa lalu, terutama sejarah kolonial negara-negara Dunia Ketiga, serta implikasinya hingga kondisi saat ini (Batterbury dan Bebbington, 1999).

Selanjutnya, peneliti Ekologi Politik wajib mengkaji dinamika dan relasi kekuasaan yang beroperasi di lokasi studi, baik dalam bentuk fisik maupun simbolik, yang memengaruhi akses dan penguasaan atas sumber daya alam setempat (Willhusen, 2004). Upaya lain adalah menelusuri peran berbagai bentuk institusi, meliputi institusi pemerintah, masyarakat, pasar, hingga hak properti—dalam fungsi mereka untuk mengatur akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam (Batterbury dan Bebbington, 1999).

Perubahan lingkungan dalam konteks Ekologi Politik dipandang sebagai hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang timbul dari pergumulan aktor di tingkat nasional maupun global (kapitalisme global). Aktor-aktor ini (termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat) tidak boleh dianggap monolitik. Faktanya, terdapat dinamika aliansi, kerja sama, konflik, dan pertentangan di antara individu atau kelompok dalam kategori aktor yang sama maupun berbeda. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa proses makro ekonomi-politik memiliki implikasi yang kontekstual; oleh karena itu, kajian mengenai konflik atas akses dan penguasaan sumber daya alam harus dilakukan secara spesifik berdasarkan konteks ruang dan waktu di mana peristiwa itu terjadi.

Dengan fokus pada kelompok marjinal secara sosial dan politik, pengkaji Ekologi Politik (EP) mengajukan dua pertanyaan penting (Bryant, 1992): (1) Sejauh mana kelompok marjinal menanggung biaya perubahan lingkungan secara tidak adil, dan bagaimana distribusi biaya yang timpang ini memperpetuasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi? (2) Dalam kondisi apa ketidaksetaraan yang dipicu oleh perubahan lingkungan ini dapat memodifikasi proses politik yang sudah ada? Saat ini, EP ditandai oleh pluralitas tujuan akademis dan praktis serta pluralitas konsep teoritik (Schubert, 2005). Salah satu konsep utama yang memengaruhi EP adalah Teori Common-Property (Robins, 2004). Teori ini menentang pandangan yang meyakini bahwa penguasaan negara atau swasta adalah satu-satunya solusi terbaik untuk masalah sumber daya 'akses terbuka', yang sebelumnya dianggap oleh Gerald Hardin sebagai akar dari kerusakan lingkungan.

Peneliti Teori *Common-Property* berhasil menunjukkan bahwa di banyak kasus, klaim Hardin mengenai kondisi 'akses terbuka' (open-access) yang merusak dalam pengelolaan sumber daya bersama tidaklah terbukti. Hal ini karena komunitas mampu menciptakan dan menegakkan aturan kolektif berbasis adat atau kesepakatan secara konsisten. Teori common-property, yang dipengaruhi kuat oleh kajian institusi, kini berfokus memahami proses sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk berbagai rezim penguasaan properti negara, swasta, dan kolektif serta implikasinya terhadap lingkungan. Secara praktis, Ekologi Politik menaruh perhatian pada dampak kebijakan rezim properti khususnya negara dan swasta terhadap akses kelompok marjinal terhadap sumber daya alam.

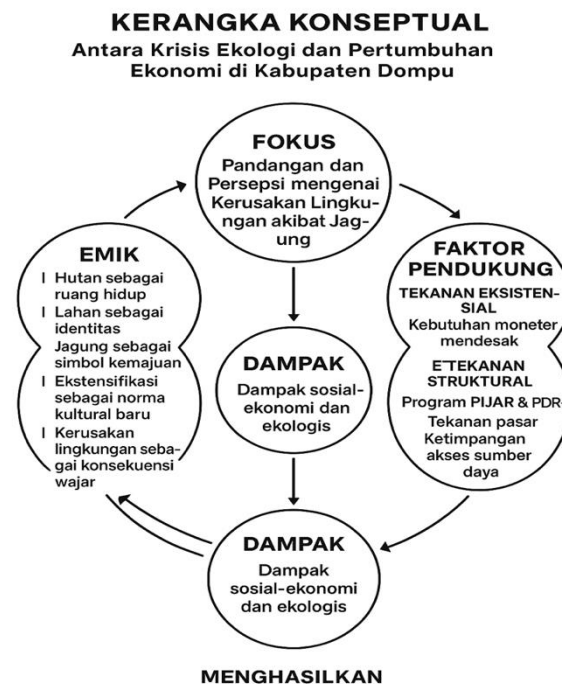
Kajian terhadap petani berkontribusi pada pemahaman tentang aksi perlawanan oleh petani dan masyarakat marjinal lainnya terhadap pihak atau struktur yang menindas. Melalui lensa Ekologi Politik, terlihat bahwa gerakan perlawanan petani sangatlah kompleks dan tidak selalu bertujuan menggulingkan rezim politik yang berkuasa. Perlawanan ini sering kali berwujud 'perlawanan sehari-hari' everyday peasant resistance, seperti yang dikonsepsikan oleh James Scott, yang cenderung sporadis dan tidak sistematis. Kompleksitas ini juga terlihat pada tujuan yang beragam serta aliansi yang dibangun, yang dapat berubah-ubah sesuai konteks.

Kontribusi feminisme memunculkan pendekatan Ekologi Politik Feminis (Rocheleau, 1995), yang mendesak penelitian untuk peka terhadap pergumulan politik mikro tentang akses sumber daya alam, termasuk isu-isu yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian, pengaruh post-strukturalis membawa EP pada kajian wacana, yang dipahami bukan sekadar narasi, tetapi sebagai praktik ideologis yang secara implisit memengaruhi kontrol sumber daya.

Peneliti EP memusatkan perhatian pada analisis kritis terhadap ide/konsep tersembunyi dalam wacana, khususnya implikasi wacana kerusakan lingkungan yang dikonstruksi oleh kelompok dominan terhadap kelompok miskin. Contohnya, label 'perambah hutan' seringkali menglegitimasi kriminalisasi terhadap masyarakat marjinal, padahal akar masalahnya adalah kebijakan alokasi lahan negara kepada pemodal yang mendesak mereka. Saat ini, EP terus berkembang dengan meluaskan fokus geografisnya ke isu lingkungan urban dan tidak lagi terikat hanya pada Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Swyngedouw dan Heynen, 2003).

1.7. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah suatu penelitian yang dilakukan maka perlu dibuat kerangka konseptual dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.



Krisis ekologis yang terjadi di Kabupaten Dompu akibat ekspansi jagung merupakan salah satu contoh paling jelas mengenai bagaimana pembangunan ekonomi dapat menciptakan paradoks: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan sementara, namun di sisi lain merusak fondasi ekologis kehidupan jangka panjang. Deforestasi masif yang terjadi dalam berbagai lanskap di Dompu tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan lingkungan. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan ekonomi, struktur sosial, nilai kultural, persepsi ekologis, serta moral ekonomi masyarakat petani.

Pendekatan-pendekatan tersebut diorientasikan untuk menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara faktor struktural, tekanan ekonomi rumah tangga, konstruksi kultural, serta dampak ekologis dan sosial yang muncul. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana masyarakat Dompu menavigasi dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kerangka konseptual ini juga memberikan dasar logis dalam menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: 1. Bagaimana masyarakat Dompu memandang kerusakan lingkungan akibat jagung? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kerusakan lingkungan? 3. Apa dampak yang dialami masyarakat terhadap kerusakan lingkungan tersebut?. Naskah ini menyajikan narasi akademik yang menggambarkan secara mendalam dinamika sosial-ekologis tersebut.

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan ekologis bersifat siklik dan saling memperkuat. Tekanan ekonomi mendorong pembukaan hutan. Persepsi budaya dan moral ekonomi memediasi tindakan tersebut. Tindakan tersebut menghasilkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya memperbesar tekanan ekonomi, karena tanah tidak lagi produktif dan risiko bencana meningkat. Siklus ini akan terus berlanjut jika tidak ada intervensi struktural dan perubahan dalam persepsi masyarakat.

Kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa krisis ekologis di Dompu bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara ekonomi, budaya, politik, dan ekologi. Pendekatan yang mengintegrasikan Ekologi Politik, Ekonomi Moral, dan

Antropologi Ekologi mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat memaknai, menghadapi, dan mereproduksi kerusakan lingkungan. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi krisis ekologis sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pemilihan Lokasi Penelitian dan Periodesasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan aspek penting dari metodologi kualitatif, terutama ketika penelitian diarahkan untuk memahami dinamika sosial-ekologis yang terikat pada konteks geografis tertentu. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah wilayah yang dalam dua dekade terakhir mengalami transformasi agraris sangat cepat yang ditandai oleh ekspansi masif komoditas jagung. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah struktur ekonomi lokal, tetapi juga memengaruhi relasi masyarakat dengan ruang ekologis, terutama hutan, lahan perbukitan, sungai, dan zona konservasi.

2.1.1. Pertimbangan Pemilihan Lokasi

Terdapat setidaknya tiga alasan yang secara metodologis mendasari pemilihan Dompu sebagai lokasi penelitian. Pertama, Dompu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling agresif dalam mendorong ekspansi jagung melalui program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut). Ekspansi ini menyebabkan perubahan besar pada tutupan lahan. Terlihat secara kasat mata bahwa lahan perbukitan yang dulunya hijau kini berubah menjadi mosaik ladang jagung dan kawasan kritis.

Kedua, Dompu mengalami peningkatan frekuensi bencana ekologis, seperti banjir bandang, hilangnya mata air, sedimentasi sungai, dan fragilitas tanah yang tinggi. Perubahan ini memiliki dimensi sosial yang kompleks, baik bagi rumah tangga petani, pemuda, maupun aktor lokal lainnya sehingga penting diteliti secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

Ketiga, Kabupaten Dompu merupakan ruang sosial dinamis dengan stratifikasi sosial, variasi praktik agraris, dan keragaman pengetahuan ekologis yang memungkinkan peneliti menangkap beragam pandangan emik. Masyarakat Dompu mencakup kelompok petani penggarap, pemilik modal, pedagang hasil pertanian, tokoh adat, masyarakat umum dan pemuda, aparat desa, hingga pelaku ekonomi seperti tengkulak dan penyedia input, yang keseluruhannya membentuk jejaring sosial-ekologis kompleks. Dengan demikian, Dompu bukan sekadar latar penelitian, tetapi merupakan arena relasional di mana pengaruh politik, ekonomi, dan transformasi ekologis bertemu.

2.1.2. Periodesasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua periodesasi utama, yakni: Periode Observasi Awal (26 Oktober 2023). Observasi awal dilakukan ketika peneliti mengikuti kegiatan lapangan bersama dosen dalam rangka melakukan kegiatan penelitian terkait *indigenous people* di Kab. Dompu tepatnya di Kecamatan Hu'u sekaligus penentuan calon topik penelitian. Pada fase ini peneliti mulai mengenali bukaan hutan skala luas, keberadaan jalan tani menuju perbukitan, struktur sosial petani jagung, percakapan warga mengenai harga jagung dan tekanan biaya hidup, indikasi awal kerusakan ekologis seperti sungai yang surut dan erosi permukaan. Observasi awal ini menjadi basis bagi peneliti dalam merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian.

Periode Penelitian Lapangan Intensif (Mei – Oktober 2024), penelitian intensif dimulai dengan pengurusan administrasi formal di tingkat kampus hingga ke kabupaten dan kecamatan. Setelah itu peneliti melakukan mobilitas lintas kecamatan dengan alur:

1. Kecamatan Hu'u
2. Kecamatan Pajo
3. Kecamatan Pekat
4. Kecamatan Kempo
5. Kecamatan Manggelewa

Setiap kecamatan dikunjungi dalam beberapa kali putaran untuk mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi visual. Total durasi penelitian lapangan berlangsung selama kurang lebih 90 hari. Rentang waktu ini bukan ditetapkan

berdasarkan standar administratif penyusunan tesis, melainkan disesuaikan dengan dinamika lapangan seperti keterbatasan biaya dsb dan proses pencapaian kejenuhan data. Dalam penelitian kualitatif, durasi penelitian ditentukan oleh tercapainya titik di mana data baru tidak lagi memberikan informasi tambahan yang substantif terhadap kategori dan tema penelitian.

Setelah berada di lapangan dalam durasi yang cukup panjang, peneliti mulai mencapai titik kejenuhan data, ditandai oleh: Informasi yang diperoleh dari wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan kategori analitik baru. Pola dan tema utama—misalnya persepsi ekologis, tekanan ekonomi, serta dilemma masyarakat—berulang secara konsisten. Triangulasi data antar-informan menunjukkan konvergensi makna. Observasi lanjutan tidak memperlihatkan fenomena baru yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi visual dan catatan lapangan telah mampu menangkap keragaman konteks sosial-ekologis di seluruh lokasi penelitian.

Dengan demikian, durasi ± 90 hari merupakan konsekuensi metodologis dari praktik kualitatif yang menuntut keterlibatan langsung, pendalaman konteks, dan jalinan interaksi intensif hingga informasi yang diperoleh stabil dan mencukupi untuk kepentingan analisis. Durasi ini sekaligus mencerminkan komitmen peneliti untuk memastikan kredibilitas, dependabilitas, dan ketelitian interpretatif, sehingga temuan yang dihasilkan mewakili pengalaman dan pandangan autentik masyarakat Dompu.

2.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, Bungin (2008: 68) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti cukup rumit. Peneliti kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti sebagai peneliti adalah instrumen utama penelitian.

Dalam format penelitian kualitatif ini, peneliti mengkaji bagaimana pengetahuan kelompok sosial maupun individu, dalam hal ini pandangan masyarakat Dompu dan para pelaku usaha pertanian serta stakeholder di wilayah penelitian. Peneliti dalam hal ini juga berupaya untuk mengumpulkan sejumlah contoh kasus dari aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga cenderung menggunakan studi kasus dengan mengulas beberapa kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dan dialami oleh kelompok masyarakat terkait dengan dampak pembukaan lahan yang mengakibatkan krisis lingkungan dalam hal ini adalah lahan kritis, longsor dan banjir yang pernah dialami oleh kelompok masyarakat. Contoh kasus tersebut kemudian menjadi rujukan peneliti dalam menguraikan profil, praktik, dan motivasi subyek-subjek kelompok masyarakat yang ada, serta hubungannya dengan kerusakan lingkungan yang mungkin muncul akibat dari persepsi beberapa kelompok masyarakat lain diluar kelompok tersebut.

Jenis penelitian atau strategi penelitian yang peneliti gunakan adalah Studi Kasus, yaitu suatu proses pengkajian dan pengumpulan data secara mendalam dan detail seputar kejadian khusus sebagai kasus yang dipilih. Dalam studi kasus, Robert Stake (dalam Denzin 1999: 313) menegaskan bahwa tanggung jawab konseptual terpenting bagi seorang peneliti adalah: (1) membingkai kasus dan mengonseptualisasikan objek penelitian; (2) memilih fenomena (gejala), menentukan tema-tema atau isu-isu yang menjadi fokus pertanyaan riset; (3) melacak pola-pola data untuk memperkaya isu-isu dalam penelitian; (4) menggunakan teknik triangulasi untuk hasil-hasil observasi penting dan landasan interpretasi; (5) menghadirkan beberapa alternatif penafsiran; (6) merumuskan pernyataan sikap atau generalisasi tentang kasus.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan studi kasus kolektif dengan mengulas beberapa contoh kasus dari momen-momen kegiatan pembukaan lahan hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara kontinyu. Penelitian ini berfokus pada fenomena spesifik ekspansi jagung dan dampaknya terhadap lingkungan serta struktur sosial masyarakat Dompu. Studi kasus

memungkinkan peneliti memahami suatu kasus secara holistik, kontekstual, dan mendalam (Stake, 1995). Wilayah Dompu memiliki karakteristik ekologis yang berbeda antar kecamatan sehingga cocok menggunakan studi kasus kolektif. Akan tetapi, ulasan penelitian yang akan dihasilkan nantinya bisa jadi tidak semata hanya berkisar pada kategori tersebut, keragaman realitas di lapangan bisa jadi jauh lebih kompleks. Hal tersebut tentu menuntut kejelian peneliti selaku peneliti untuk lebih peka terhadap hal-hal tersebut.

Kemudian, Karakteristik penelitian kualitatif yang digunakan meliputi, Dilakukan dalam situasi natural: penelitian dilakukan langsung dalam kehidupan masyarakat Dompu, bukan dalam kondisi yang direkayasa. Peneliti sebagai instrumen utama: seluruh proses—pengumpulan data, interpretasi, hingga penyajian—bergantung pada kehadiran peneliti. Mengutamakan makna daripada angka: data berupa narasi, pengalaman hidup, simbol, tindakan, dan interaksi sosial. Bersifat deskriptif–interpretatif: penelitian tidak hanya menjelaskan *apa* yang terjadi, tetapi *mengapa* dan *bagaimana* masyarakat memaknai perubahan ekologis. Responsif dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

2.3. Penentuan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* pada tahap awal untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan signifikan mengenai masalah ekologis dan agraria. Pemilihan didasarkan pada hal kedudukan sosial, pengalaman ekologis, keterlibatan dalam pertanian jagung, pemahaman terhadap perubahan lingkungan. Setelah itu, teknik dikembangkan menjadi *snowball sampling*, yaitu penambahan informan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Teknik ini mengikuti definisi Sugiyono (2019) jaringan informan bertambah secara alami seperti bola salju. dimulai dari informan kunci yang dianggap memahami permasalahan, lalu berkembang berdasarkan rekomendasi informan berikutnya. Cara ini efektif untuk penelitian lapangan yang menuntut akses sosial melalui kepercayaan komunitas, terutama pada masyarakat pedesaan yang cenderung tertutup terhadap pihak luar.

Teknik snowball sampling dalam penelitian ini tidak hanya mengikuti prosedur teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), tetapi berkembang secara alami berdasarkan dinamika sosial yang ditemui peneliti di lapangan. Proses penentuan informan tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui jaringan sosial yang terbentuk dari kedatangan pertama peneliti di Dompu, interaksi administratif, hingga rekomendasi informal dari masyarakat lokal.

Proses snowball dimulai dari pengalaman awal peneliti ketika pertama kali mendatangi Kabupaten Dompu pada Oktober 2023 dalam rangka kegiatan penelitian bersama dosen. Pada kunjungan tersebut, peneliti berkesempatan berinteraksi dengan beberapa warga yang kemudian menjadi rujukan awal untuk memahami isu pembukaan lahan dan jagung. Kontak-kontak awal ini menjadi embrio jaringan informan penelitian. Selain itu, pada tahap persiapan administrasi penelitian di Kabupaten Dompu pada Juli 2024, peneliti memperoleh dukungan dari staf pemerintah kabupaten yang kemudian menghubungkan peneliti dengan kenalan mereka di Kecamatan Hu'u. Salah seorang staf bahkan menelpon kerabatnya di Hu'u agar peneliti dapat tinggal sementara di rumahnya. Kontak personal semacam ini menjadi pintu masuk sosial yang sangat penting dalam konteks penelitian kualitatif pada masyarakat pedesaan yang cenderung selektif terhadap orang luar.

Perkembangan informan dalam penelitian ini juga terjadi melalui interaksi sosial yang bersifat spontan dan berlangsung dalam ruang keseharian masyarakat Dompu. Peneliti menemukan bahwa masyarakat umum seperti tukang ojek, pemuda, bahkan anak kecil yang ditemui di berbagai lokasi publik justru menjadi sumber informasi penting untuk memahami persepsi ekologis, narasi harian, serta pengalaman langsung terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Dari jalur akses tersebut, terbentuk tiga kategori informan kunci awal yang menjadi rujukan utama, tokoh adat, kelompok tani, perangkat desa. Ketiganya menjadi sumber informasi awal sekaligus mediator sosial yang memperkenalkan peneliti kepada informan lain yang lebih mengetahui detail praktik pembukaan lahan dan dinamika produksi jagung. Melalui rekomendasi dari para informan kunci awal, peneliti diperkenalkan kepada kelompok pelaku agraria yang

memiliki keterlibatan langsung di lapangan, meliputi: *penggawa*, petani pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani. Pada tahap ini, wawancara dan observasi mulai mengungkap variasi praktik pengelolaan lahan, dinamika pembukaan hutan, serta tekanan ekonomi.

Setelah memahami struktur dasar produksi pertanian jagung, informan lapangan kemudian mengarahkan peneliti kepada pelaku ekonomi dan sosial lain yang mempengaruhi struktur agraria di Dompu, yaitu: tengkulak dan pedagang input pertanian, Ibu-ibu sebagai pelaku ekonomi domestik dan penjaga pengetahuan ekologis, pemuda desa yang terlibat dalam kegiatan panen, pengangkutan, kerja upahan, yang terhubung secara ikatan emosional dengan penulis akibat kesamaan atau hobi tertentu, pedagang pasar dan pemilik kios kecil. Pada tahap ini, *snowball* berkembang mengikuti arus jaringan sosial desa dan hubungan ekonomi yang saling terkait, sehingga peneliti dapat melihat relasi antara struktur kebutuhan rumah tangga, dan praktik ekologis masyarakat.

Salah satu jalur unik yang memperkaya proses *snowball sampling* terjadi melalui interaksi peneliti dengan pemuda desa. Hubungan ini berawal dari percakapan ringan di warung kopi atau di pusat-pusat keramaian suatu dusun, kemudian berlanjut pada kegiatan bermain gim *Mobile Legends* bersama. Melalui aktivitas tersebut, peneliti membangun hubungan pertemanan yang alami dan setara. Dalam konteks kualitatif, relasi informal seperti ini sangat membantu membuka ruang diskusi yang lebih jujur dan cair, karena pemuda desa cenderung lebih terbuka saat berbicara dalam suasana nonformal. Dari pertemanan ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai, keterlibatan pemuda dalam pekerjaan upahan pertanian, pandangan mereka terhadap perubahan lingkungan, pola penggunaan lahan di perbukitan, serta pengalaman mereka menghadapi risiko ekologis seperti kebakaran lahan dan banjir. Interaksi semacam ini memperluas jangkauan informan ke kelompok yang sering terabaikan dalam penelitian formal, namun sangat relevan untuk memahami dinamika ekologis dan sosial di tingkat generasi muda.

Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peneliti—yang diperoleh melalui proses tinggal di rumah warga, menetap sementara di masjid, serta beraktivitas di warung kopi dan ruang-ruang publik—informan mulai membuka akses ke jejaring yang lebih luas, meliputi: aparat pemerintah kecamatan, staf taman nasional (Taman Nasional Gunung Tambora), pengurus masjid, warga biasa yang mengetahui perubahan ekologis di wilayahnya. Keberadaan informan dari kelompok ini memperkaya pemahaman peneliti mengenai aturan formal, pengawasan lapangan, mitigasi bencana, serta pengetahuan lokal mengenai perubahan hutan, sumber air, dan iklim.

Proses *snowball sampling* secara metodologis dihentikan setelah peneliti mencapai titik kejenuhan data (data saturation). Kejenuhan ini ditandai oleh Informasi dari informan baru tidak lagi menghasilkan kategori atau tema baru. Narasi mengenai tekanan ekonomi, praktik pembukaan lahan, dan perubahan ekologis mulai berulang. Triangulasi antara petani, tokoh adat, aparat desa, dan pelaku pasar menunjukkan konsistensi makna. Observasi tambahan di berbagai kecamatan (Hu'u, Pajo, Pekat, Kempo, Manggelewa) tidak menunjukkan fenomena baru yang signifikan. Pola praktik seperti tebang–bakar, ekspansi lahan, dan logika ekonomi petani telah terekam secara memadai. Dengan demikian, berakhirnya proses *snowball* bukan disebabkan oleh keterbatasan administratif tesis, melainkan murni pertimbangan metodologis bahwa data yang diperoleh telah mencukupi, stabil, dan representatif untuk kepentingan analisis.

Alur *snowball sampling* dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa jaringan informan tidak semata mengikuti struktur formal desa, tetapi berkembang melalui hubungan kekerabatan, rekomendasi personal, dan kepercayaan sosial yang dibangun peneliti selama tinggal di Dompu. Dengan memasukkan masyarakat umum yang ditemui secara spontan sebagai bagian dari alur *snowball*, penelitian ini menegaskan bahwa jaringan data berkembang melalui kepercayaan, kedekatan, dan interaksi sosial, ruang informal seperti warung, masjid, dan permainan gim dapat menjadi kanal penting dalam penelitian kualitatif, perspektif masyarakat biasa menjadi elemen kunci untuk memahami krisis ekologis secara utuh di Kabupaten Dompu.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang dianggap

relevan dan efektif dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipasi (*participant observer*). Cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan seseorang, khususnya para informan kelompok masyarakat kabupaten Dompu adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan intensif.

2.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pengamatan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan perilaku para informan dari kelompok masyarakat, petani, pelaku usaha pertanian, pemerintah, LSM baik dari penampilan hingga gesture mereka ketika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga mengamati para subyek kelompok tersebut ketika mereka sedang terlibat dalam momen-momen kegiatan pertanian, baik dalam hutan maupun tidak. Hal ini demi memperoleh data terkait sejumlah instrumen kerja yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Iskandar (2009:121) mengemukakan bahwa kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang sedang dilakukan. Pengamatan dimaksudkan untuk menghimpun berbagai realitas yang berhubungan dengan aktivitas para subyek kelompok masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok di tengah-tengah masyarakat di mana mereka tinggal. Dengan menggunakan metode pengamatan, peneliti mengamati aktivitas subjek kelompok masyarakat, mulai dari aktivitas pagi hingga istirahat. Tujuannya agar peneliti mampu mendeskripsikan apa yang mereka sering perbincangkan terkait narasi lingkungan maupun aktivitas ekonomi pertanian dll.

Disamping itu, dalam mengkaji para aktor ini dimensi gender, umur, etnisitas, kelas, dan stratifikasi sosial lainnya penting untuk diperhatikan. Peneliti akan menelusuri berbagai proses lokal dan non-lokal dari nasional hingga internasional yang mempengaruhi respons aktor dan pilihan-pilihan mereka. Peneliti mengamati kondisi tempat tinggal mereka, khususnya di daerah-daerah mana saja mereka bergaul dan menghabiskan waktu mereka, serta apa-apa saja mata pencaharian yang mereka miliki. Sekiranya mereka berkenan, peneliti juga tertarik untuk mengamati dan mengikuti pembicaraan-pembicaraan mereka ketika mereka sedang menjalankan aktivitas sehari-hari dengan teman sepeergaulan di wilayah mereka. Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan catatan-catatan dan kamera sebagai alat dokumentasi observasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika sosial, praktik agraria, dan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Dompu. Dalam penelitian kualitatif dengan observasi bukan sekadar aktivitas melihat, tetapi merupakan proses pemahaman mendalam melalui keterlibatan aktif dalam ruang sosial masyarakat. Observasi dilakukan secara berulang, berlapis, dan lintas lokasi selama kurang lebih tiga bulan penelitian lapangan.

Observasi dalam penelitian ini mencakup dua bentuk utama, yaitu observasi nonpartisipatif pada tahap awal dan observasi partisipatif pada tahap berikutnya ketika relasi sosial dengan masyarakat mulai terbangun. Keduanya dilakukan untuk menangkap beragam pola interaksi, makna, dan praktik keseharian dalam konteks produksi jagung dan perubahan lingkungan. Observasi pertama dilakukan pada Oktober 2023, ketika peneliti datang ke Dompu dalam rangka kegiatan bersama dosen. Pada tahap ini, fokus observasi adalah mengenali lanskap ekologis dan agraris Dompu, mengidentifikasi isu awal yang berpotensi menjadi topik penelitian, membangun pemahaman awal tentang struktur sosial desa, mengamati pola ruang dan aktivitas masyarakat. Pada tahap awal ini peneliti mencatat fenomena yang paling mencolok, yaitu, hamparan jagung yang membentang dari jalan raya hingga perbukitan, pembukaan lahan hutan di dataran miring, dan jaringan jalan tani baru yang menembus areal perbukitan. Observasi awal ini membantu peneliti menentukan fokus penelitian terkait krisis ekologis akibat ekspansi jagung.

Observasi intensif dimulai sejak peneliti kembali ke Dompu pada Juli 2024 dan Desember 2024. Setelah pengurusan izin penelitian di tingkat kabupaten, peneliti melakukan perjalanan observasi ke beberapa kecamatan, Hu'u, Pajo, Pekat, Kempo, dan Manggelewa. Setiap lokasi memberikan konteks sosial dan ekologis yang berbeda. pertama adalah peneliti mengamati

lingkungan fisik dan aktivitas masyarakat tanpa terlibat langsung, seperti di ladang jagung yang berada di lereng bukit, area hutan bekas tebang bakar, sungai-sungai yang debitnya menurun, pasar tradisional, pusat-pusat desa dan dusun, serta melihat daya beli dan hal-seperti kendaraan roda empat dan dua yang menandai bahwa Dompu telah mengalami kemajuan ekonomi. Observasi ini penting untuk memahami konteks social-ekologis secara objektif.

Kemudian, Peneliti ikut serta dalam aktivitas warga, misalnya menyusuri ladang bersama petani, mengikuti percakapan malam di tempat kumpul masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan di masjid, maupun hajatan tertentu dan ikut dengan informan untuk melakukan pembukaan lahan dan melihat lahan-lahan jagung informan. Ini disebut sebagai observasi partisipatif yang dimana memungkinkan peneliti menangkap makna sosial yang tidak muncul dalam wawancara formal.

Adapun observasi dilakukan di jalan lintas desa yang dipenuhi lahan jagung, pasar tradisional tempat transaksi jagung kering, tempat kumpul warga yang biasanya berada di salah satu rumah warga yang berdiskusi tentang hal apa saja termasuk didalamnya hasil panen dan kerusakan lingkungan, pabrik pengering (dryer) jagung yang menunjukkan skala ekonomi komoditas, warung kelontong tempat transaksi pupuk, bibit, dan pestisida berlangsung, masjid sebagai ruang sosial keagamaan. Pada ruang-ruang publik ini, peneliti mengamati percakapan spontan masyarakat, misalnya mengenai, gagal panen, utang modal, sampai kekhawatiran terhadap banjir bandang.

Sedangkan Observasi Lanskap Ekologis dilakukan pada area hutan bekas pembukaan lahan, lahan-lahan miring yang menunjukkan bekas tebang dan pembakaran, semak belukar pasca-dibakar, aliran sungai yang mulai menyempit atau mengering, titik-titik rawan erosi dan longsor, kawasan sekitar Gunung Tambora, zona pertanian jagung di sepanjang jalur Pajo – Hu'u – Pekat – Kempo. Kemudian peneliti mengamati degradasi tanah, intensitas debu pada musim kemarau, penurunan tutupan vegetasi, jejak kebakaran lahan, perubahan warna air sungai saat hujan. Observasi ekologis membantu memahami bagaimana pembukaan hutan berdampak langsung pada kualitas tanah dan air.

Kemudian, observasi aktivitas pertanian dilakukan di ladang milik petani, baik petani pemilik maupun penggarap. Peneliti mengamati: proses pembersihan lahan, metode tebas-bakar, penggunaan alat (parang, sabit, motor pengangkut), interaksi buruh tani dan pemilik lahan, alur kerja dari pagi hingga sore, praktik pemupukan dan penyemprotan pestisida. Kegiatan observasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan memperluas lahan merupakan konsekuensi logis dari sistem pertanian yang bergantung pada jagung sebagai komoditas utama.

Seiring waktu, ketika peneliti mulai tinggal sementara di masjid, rumah informan kunci, atau kontrakan warga, bentuk observasi menjadi lebih partisipatif. Peneliti ikut serta duduk di warung kopi bersama petani dan pemuda, mengikuti aktivitas warga menuju ladang, terlibat dalam diskusi santai mengenai apapun seperti lelucon-lelucon, mengenai negara, utang, pupuk, panen, deforestasi dan hal lainnya, mengikuti pertemuan informal di rumah tokoh masyarakat atau pengurus masjid, bermain gim Mobile Legends bersama pemuda desa sehingga terbangun relasi pertemanan yang alami. Melalui relasi sosial ini, observasi partisipatif memberi peneliti akses pada, obrolan jujur tentang kondisi ekonomi rumah tangga, keluhan sosial terkait bantuan pemerintah, pengalaman emosional saat banjir atau kebakaran lahan, pemaknaan moral masyarakat terhadap hutan dan lingkungan.

Di sisi lain, seluruh kegiatan observasi didukung oleh catatan lapangan harian *field notes* yang mencatat suasana, gestur, dan percakapan spontan, dokumentasi foto, terutama kondisi lahan kritis, sungai, dan perbukitan, rekaman audio untuk memperkuat narasi informan ketika diskusi berlangsung di ruang terbuka. Catatan lapangan membantu peneliti merekam konteks nonverbal dan atmosfer sosial yang tidak selalu muncul dalam wawancara formal.

Observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengonfirmasi (triangulasi) data wawancara, terutama terkait kerusakan lingkungan. Membaca relasi antara ekonomi rumah tangga dan tindakan ekologis. Memahami logika sosial pembukaan lahan, bukan hanya dari narasi verbal tetapi dari praktik nyata. Menangkap simbolisme, bahasa tubuh, dan humor lokal yang tidak muncul

dalam wawancara formal. Memahami lanskap ekologis secara embodied, yaitu melalui kehadiran fisik peneliti di lokasi-lokasi kritis.

Melalui observasi multi-lokasi dan multi-ruang ini, peneliti mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana deforestasi yang diakibatkan oleh sistem agraria jagung saling mempengaruhi kehidupan masyarakat Dompu. Observasi memberikan fondasi kuat untuk analisis mengenai persepsi masyarakat tentang hutan dan lingkungan, tekanan struktural dan ekonomi yang membentuk tindakan petani, serta dampak ekologis yang terlihat dan dialami sehari-hari. Observasi intensif selama ini memastikan bahwa data yang diperoleh bukan hanya narasi, tetapi juga praktik, gestur, ruang hidup, dan memori ekologis yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dompu.

2.4.2. Wawancara

Metode pengamatan diatas diperkuat dengan wawancara. Wawancara peneliti lakukan secara mendalam untuk mendapatkan gambaran profil subyek-subyek kelompok masyarakat, menggali motivasi mereka terlibat dalam aktivitas kerusakan lingkungan, mendapatkan uraian seputar perilaku yang mereka jalankan, serta mendapatkan gambaran pola relasi yang selama ini terjalin antara masyarakat di lingkungan mereka dan anggota masyarakat yang mana mereka hidup.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menggali makna, memahami pengalaman sosial, serta mengungkap pandangan masyarakat Dompu mengenai perubahan ekologis yang terjadi akibat ekspansi pertanian jagung. Wawancara dilakukan secara langsung, berulang, dan intensif untuk menangkap detail naratif serta konteks sosial yang tidak terlihat melalui observasi saja.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk mendeskripsikan profil informan, menggali motivasi sosial-ekonomi, memahami praktik pembukaan lahan dan relasi agraria, menelusuri ingatan ekologis dan sejarah lingkungan, merekam persepsi, pengalaman, dan dilema masyarakat, mengungkap relasi – relasi dan struktur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan wawancara dilakukan secara fleksibel mengikuti ritme hidup masyarakat Dompu, termasuk menyesuaikan waktu dan lokasi wawancara dengan kenyamanan informan.

Wawancara tidak hanya dilakukan dalam format formal, tetapi juga berlangsung melalui interaksi informal yang merupakan bagian dari ciri penelitian antropologi. Wawancara dilakukan ketika peneliti berada di rumah informan, mendampingi informan di ladang, berbincang di balai desa dan kantor kecamatan, berbincang santai sambil minum kopi, bertemu informan di warung, tinggal sementara di masjid atau rumah kerabat informan, bahkan melalui relasi pertemanan sehari-hari, termasuk bersama pemuda desa saat memainkan gim Mobile Legends. Situasi-situasi ini menciptakan suasana komunikasi yang natural dan memungkinkan informan berbicara secara jujur mengenai pengalaman ekologis dan tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Wawancara dilakukan melalui beberapa tahap pertama adalah Tahap Pembuka dimana membangun rapport, pada tahap ini peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian dengan bahasa sederhana, menghormati norma setempat, meminta persetujuan untuk wawancara, memulai percakapan ringan tentang aktivitas harian, keluarga, atau cuaca. Pendekatan ini diperlukan karena pada awal penelitian dimanapun masyarakat cenderung berhati-hati terhadap orang luar. Membangun rapport dilakukan melalui, ikut berbincang santai di warung, menemani warga makan siang, duduk bersama di masjid, atau beraktivitas bersama pemuda desa. Tahap ini sangat penting dalam membuka kepercayaan dan kedekatan emosional.

Pada tahap ini peneliti menggali aspek-aspek seperti, profil social informan, pengetahuan ekologis dan memori ekologis, motivasi terlibat dalam pembukaan lahan yang massif, kemudian peneliti mengelaborasi apakah motivasi bersifat intrinsik (kepercayaan moral, nilai budaya), atau instrumental (kepentingan ekonomi, survival). Kemudian menggali hubungan antara pemilik lahan vs penggarap, petani vs tengkulak, masyarakat vs aparat kehutanan, kelompok tani vs pemerintah desa, serta relasi patron-klien dalam utang modal jagung serta pengalaman emosional terkait pandangan masa depan lingkungan Dompu, rasa bersalah atas deforestasi yang terjadi, konflik moral antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Emosi dan narasi moral ini

merupakan bagian penting dari analisis ekonomi dan ekologi politik. Pada akhirnya, peneliti tetap berinteraksi secara sosial sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi informan.

Wawancara juga dilakukan di berbagai lokasi sesuai kenyamanan informan, Pemilihan lokasi ini bukan semata kebutuhan teknis, tetapi juga upaya memahami konteks ekologis dan sosial dari ucapan informan secara *situated*. Kemudian, seluruh wawancara direkam menggunakan tape recorder atau HP (atas izin informan), ditranskripsi secara verbatim, diberi kode kategori (petani, pemuda, tengkulak, aparat), dilengkapi catatan nonverbal seperti ekspresi, nada suara, jeda, dan emosi. Dalam situasi ketika informan menolak direkam, peneliti mengandalkan catatan lapangan manual yang kemudian ditulis ulang sesaat setelah wawancara berakhir. Dengan demikian, wawancara bukan hanya sarana memperoleh data verbal, tetapi juga jendela untuk memahami struktur batin, nilai moral, dan pengalaman ekologis masyarakat Dompu.

Penggunaan wawancara mendalam dalam penelitian ini memungkinkan peneliti menangkap narasi masyarakat secara otentik, baik dari petani penggarap, pemuda desa, tokoh adat, hingga aktor struktural seperti aparat desa. Keragaman narasi ini tidak hanya memberi gambaran mikro tentang praktik pembukaan lahan, tetapi juga mencerminkan dinamika makro berupa tekanan ekonomi, perubahan budaya ekologis, dan transformasi agraria di Kabupaten Dompu.

2.5. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara serta observasi lapangan. Dokumentasi berfungsi tidak hanya sebagai bukti empiris, tetapi juga sebagai sarana untuk menangkap dimensi visual, simbolik, dan emosional dari praktik sosial dan ekologis masyarakat Dompu. Menurut Moleong (2018), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mencatat, atau merekam berbagai sumber data, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun suara, yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif memiliki peran penting untuk menambah kedalaman interpretasi, terutama dalam memahami konteks sosial yang tidak selalu terungkap melalui wawancara verbal.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan melalui dua alat utama, yaitu, Perekaman Suara (Audio Recording / Tape Recorder) digunakan untuk merekam wawancara mendalam dengan para informan, baik tokoh adat, petani, maupun masyarakat umum. Perekaman dilakukan dengan izin dari informan, setelah peneliti menjelaskan tujuan penggunaan data dan menjamin kerahasiaannya. Rekaman suara ini membantu peneliti untuk menangkap intonasi, jeda, dan emosi dalam percakapan, yang penting untuk analisis makna kultural dan moral di balik narasi. File audio disimpan dalam format digital (.mp3) dan ditranskripsi secara verbatim untuk keperluan analisis tematik.

Dokumentasi Visual (Kamera Biasa / Kamera HP) Kamera digunakan untuk merekam situasi lingkungan, aktivitas masyarakat, dan kondisi ekologis seperti lahan jagung, sungai yang mengering, atau sisa-sisa kebakaran lahan. Foto-foto ini berfungsi sebagai data visual pendukung yang membantu menjelaskan konteks sosial-ekologis yang dibahas dalam hasil penelitian. Pengambilan gambar dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, yakni tidak menampilkan identitas personal tanpa izin, serta menjaga martabat dan privasi masyarakat lokal.

Selain dua teknik utama tersebut, peneliti juga melakukan dokumentasi tertulis berupa: Catatan lapangan (*field notes*) yang memuat pengamatan nonverbal, suasana, serta refleksi peneliti selama proses interaksi sosial; Dokumen lokal seperti berita desa, laporan kelompok tani, dan foto lama yang diperoleh dari warga atau lembaga lokal.

Keseluruhan dokumen, baik audio, visual, maupun tertulis, disimpan secara sistematis dan diberi kode sesuai kategori informan. Data ini kemudian digunakan untuk triangulasi sumber (Denzin, 1978), guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Dokumentasi memiliki fungsi triangulatif, memperkuat validitas temuan dan memberikan dimensi visual terhadap analisis.

2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan Miles & Huberman (1994) dan diperkaya dengan pendekatan analitis dalam penelitian kualitatif etnografis. Analisis berlangsung sejak awal penelitian, bukan hanya setelah seluruh data terkumpul. Proses analisis dilakukan secara siklik (bersifat sirkular), meliputi:

1. Reduksi data, dimana proses ini untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data mentah dalam bentuk catatan observasi, transkrip wawancara, dokumentasi (foto, rekaman audio), memo lapangan, refleksi peneliti, hasil percakapan informal. Pada tahap ini, peneliti melakukan coding terhadap data dengan langkah seperti misalnya peneliti mengelompokkan data berdasarkan topik umum seperti “perubahan lanskap”, “dilema”, “tekanan ekonomi”, “pengetahuan lokal”, “krisis air”, “ekstensifikasi. Kemudian, kode-kode awal dihubungkan untuk menemukan pola relasional, misalnya hubungan antara “utang–tekanan pasar–ekstensifikasi lahan”. Selanjutnya peneliti memilih kategori inti yang paling menjelaskan fenomena besar penelitian, seperti tekanan struktural dan kebijakan dalam hal ini factor eksternal. Reduksi data dilakukan secara berulang, termasuk merevisi kategori sesuai temuan lapangan.
2. Penyajian Data, Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan kutipan langsung dari informan untuk mempertahankan keutuhan makna. Penyajian data disusun sedemikian rupa agar memperlihatkan hubungan antara faktor, pandangan, dan dampak ekologis. Misalnya, kutipan wawancara yang dipadukan dengan data visual foto kondisi lahan dan catatan lapangan, untuk menunjukkan keterkaitan antara kesadaran ekologis dan tekanan ekonomi struktural. Pendekatan ini membantu peneliti menampilkan suara masyarakat tanpa mereduksi konteks sosial dan moral di balik pernyataan mereka. Penyajian data berfungsi membantu peneliti memahami keterhubungan antar kategori dan menarik kesimpulan secara logis.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi dengan data baru hingga mencapai validitas interpretatif. Kesimpulan tidak hanya bersifat deskriptif apa yang terjadi, tetapi juga interpretatif mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Kemudian setelah itu dilakukan teknik validasi data yang dimana peneliti gunakan adalah Triangulasi: 1) triangulasi data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, mewawancarai informan yang memiliki status atau kelompok yang berbeda atau dengan sudut pandang yang berbeda; peneliti lakukan berulang-ulang kali setiap melakukan penelitian dan turun lapangan, 2) triangulasi teori – penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan sekumpulan data; peneliti juga lakukan setiap kali turun lapangan dan menulis hasil penelitian, 3) triangulasi metode – penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara dan pengamatan.

2.7. Etika Penelitian

Etika penelitian menjadi aspek fundamental dalam metodologi kualitatif, terutama ketika peneliti memasuki ruang sosial masyarakat yang rentan terhadap stigma, konflik agraria, serta persoalan ekologis. Dalam penelitian ini, aspek etika diperhatikan melalui beberapa Langkah.

Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian kepada informan dan meminta persetujuan untuk wawancara atau dokumentasi. Identitas informan disamarkan menggunakan inisial atau kode tertentu untuk menjaga kerahasiaan, terutama bagi: petani yang membuka lahan hutan, perangkat desa yang memberikan informasi sensitive, pedagang yang terlibat dalam rantai ekonomi jagung, kemudian pemuda desa yang mengkritik kebijakan. Penjagaan identitas sangat penting di daerah yang memiliki potensi konflik lahan dan tekanan kebijakan.

Peneliti merupakan orang luar Dompu, sehingga kehadiran peneliti membawa potensi kesenjangan sosial, politik, maupun kultural. Untuk itu, peneliti memperhatikan, sikap sopan dalam interaksi, menghindari pertanyaan yang berpotensi menyinggung, mengikuti norma setempat seperti mengucapkan salam, meminta izin, menjaga sensitivitas terhadap isu agama, gender, dan

politik lokal. Proses “masuk” ke komunitas dilakukan secara bertahap melalui tokoh adat dan informan kunci.

Sebagian informan merasa bersalah atau tidak nyaman ketika ditanya mengenai pembukaan lahan hutan. Untuk itu peneliti, tidak melakukan judgement, tidak memojokkan informan, memfokuskan pada pengalaman dan perspektif mereka, memberi ruang bagi narasi alternatif. Prinsip etika utamanya adalah penelitian tidak boleh menyebabkan kerugian bagi informan.

2.8. Hambatan Penelitian

Selama proses penelitian di lapangan, peneliti menghadapi beberapa hambatan baik teknis maupun non-teknis. Hambatan-hambatan ini menjadi bagian penting dari dinamika penelitian kualitatif yang menuntut adaptasi, improvisasi, dan kepekaan sosial dalam setiap tahap pengumpulan data. Tentunya juga setiap penelitian lapangan memiliki tantangan tersendiri, pada studi ini hambatan yang dihadapi peneliti cukup signifikan mengingat kondisi geografis Dompu dan sensitivitas isu ekologis.

Pada minggu pertama, peneliti mengalami kesulitan untuk memahami struktur sosial, mencari tempat tinggal yang aman, menavigasi jalur antar kecamatan, menjalin hubungan sosial dengan warga. Sementara itu opsi untuk tinggal sementara di masjid membantu peneliti mengamati ritme sosial masyarakat dan membuka pintu komunikasi.

Beberapa hambatan mencakup, kondisi jalan antar kecamatan yang jauh dan panas hingga berdebu dan becek, terutama menuju perbukitan, kemudian sulitnya sinyal telekomunikasi yang terbatas di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Pekat; jarak antar dusun yang terpencil. Hal ini menuntut peneliti untuk memodifikasi rencana perjalanan secara fleksibel. Peneliti menghadapi sikap awal informan yang ragu memberikan informasi terkait pembukaan hutan, khawatir disalahpahami, takut informasi digunakan untuk kepentingan hukum atau media. Namun setelah membangun rapport, informan mulai terbuka.

Beberapa dokumen desa/kecamatan tidak tersip dengan baik. Data resmi mengenai luas lahan terbuka, kehilangan tutupan hutan, debit mata air, banjir, tidak selalu tersedia sehingga peneliti bergantung pada triangulasi lapangan serta data dari berita online. Karena durasi penelitian yang cukup terbatas, peneliti harus melakukan perjalanan lintas kecamatan berulang kali, mengulang wawancara untuk konfirmasi data.

2.9. Validitas Data dan Realibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas tidak dipahami sebagai pengukuran statistik, melainkan kesahihan data melalui proses verifikasi, kedalaman, dan keterandalan interpretasi. Untuk menjaga kualitas data penelitian ini, peneliti menerapkan empat prinsip validitas kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985): *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Kredibilitas, hal ini dicapai melalui peneliti menetap di Dompu selama kurang lebih tiga bulan, melakukan pertemuan berulang dengan informan, ikut serta dalam aktivitas keseharian mereka, dan mengamati proses sosial secara terus-menerus. Kemudian Triangulasi sumber, metode, dan teori digunakan untuk memastikan konsistensi temuan dari berbagai perspektif. Selanjutnya, beberapa temuan diuji kembali kepada informan utama seperti tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, dan aparat desa untuk memastikan akurasi interpretasi. Hingga pada peneliti berdiskusi dengan rekan akademik dan pembimbing untuk menguji subjektivitas interpretasi.
2. Transferability (Keteralihan), hal ini dicapai melalui *thick description*, yakni penyajian deskripsi tebal mengenai konteks sosial-ekologis Dompu, termasuk lanskap pertanian, struktur sosial, serta dinamika ekonomi jagung. Penjelasan detail memungkinkan pembaca menilai apakah hasil penelitian dapat diterapkan di konteks lain yang serupa.
3. Dependability (Keandalan Proses), Dependability dijaga dengan menyusun *audit trail*, mencatat seluruh proses penelitian (observasi, wawancara, refleksi), mendokumentasikan perubahan strategi selama berada di lapangan, menyimpan catatan harian penelitian,

termasuk kesulitan dan dinamika interaksi sosial. Hal ini memberikan landasan untuk melihat konsistensi proses penelitian.

4. Confirmability (Objektivitas), dijaga dengan menjaga jarak dengan bias personal, menulis catatan reflektif harian, membedakan dengan tegas antara data dan interpretasi, menggunakan triangulasi untuk mengkonfirmasi makna sosial yang muncul dari wawancara. Dengan demikian, temuan penelitian lebih merupakan representasi pengalaman informan, bukan sekadar opini peneliti.

2.10. Refleksi Penelitian

Selama proses penelitian, peneliti menyadari posisi dirinya sebagai “orang luar” (outsider) yang memasuki ruang sosial masyarakat Dompu. Untuk itu, peneliti berusaha membangun relasi sosial yang setara dengan informan, tidak hanya sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pendengar aktif dan peserta yang menghormati pengalaman hidup mereka. Dalam beberapa kesempatan, peneliti dihadapkan pada dilema etis saat informan mengaitkan kerusakan lingkungan dengan praktik sosial yang masih berlangsung, seperti pembakaran lahan atau penggunaan utang untuk modal jagung. Dalam situasi tersebut, peneliti memilih untuk tidak menghakimi atau menasihati, melainkan mendengarkan secara empatik agar data yang diperoleh tetap mencerminkan pandangan autentik masyarakat. Refleksi ini membantu peneliti menjaga keseimbangan antara posisi akademik dan tanggung jawab moral sebagai peneliti sosial.

Berbagai pertimbangan etis dan hambatan lapangan yang dihadapi selama proses penelitian menunjukkan bahwa penelitian etnografis bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga tentang proses memahami manusia dan konteks sosialnya secara reflektif. Melalui keterlibatan langsung, adaptasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, peneliti tidak hanya memperoleh data empiris, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial-ekologis masyarakat Dompu. Hasil dari proses tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab III, yang membahas temuan lapangan dan analisis pandangan, faktor-faktor penyebab, serta dampak sosial-ekologis yang muncul dari praktik agraria masyarakat Dompu.